



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

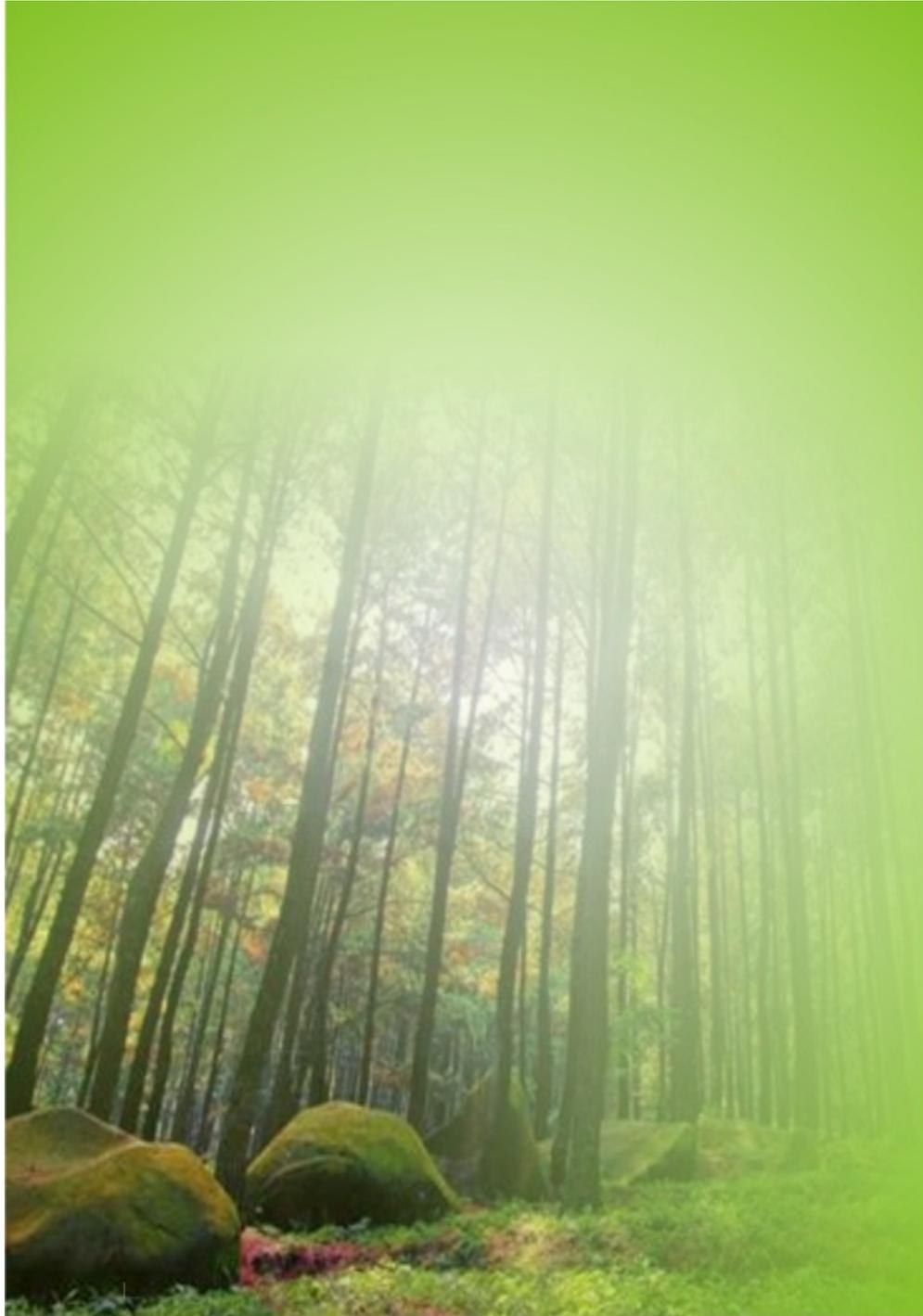


PADANG, JANUARI 2020
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PADANG, JANUARI 2020
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Kepala SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang didanai APBD maupun sumber dana lainnya.

Laporan kinerja ini menguraikan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut merupakan bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan kehutanan pada khususnya dan pembangunan Sumatera Barat pada umumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dan penyampaian laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dengan demikian, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, penyampaian laporan kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penyuluhan dan perhutanan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kehutanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW substansi kehutanan dan penyiapan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah *hotspot* dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan *illegal logging* melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
4. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
5. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBP dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta ekspor melalui perbaikan perizinan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), penataan industri, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
6. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
7. Peningkatan tata kelola organisasi dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 dan melaksanakan seluruh kegiatan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja. Monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran juga merupakan upaya percepatan peningkatan tata kelola organisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur; dan
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang kesepuluh yaitu “Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”. Dukungan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dimaksud dilakukan melalui 12 Program yaitu:

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan,
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan,
4. Program Pemantapan Kawasan Hutan,
5. Program Perhutanan Sosial,
6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Secara detail kaitan antara RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.

Misi	Prioritas	Tujuan	Sasaran Perubahan RPJMD	Sasaran Berdasarkan Rekomendasi Tim Penguatan SAKIP melalui Surat Keputusan Gubernur	Program
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	3. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan. 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan. 4. Program Pemantapan Kawasan Hutan. 5. Program Perhutanan Sosial. 6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat Eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian

dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan organisasi, struktur dinas mengalami penambahan Eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

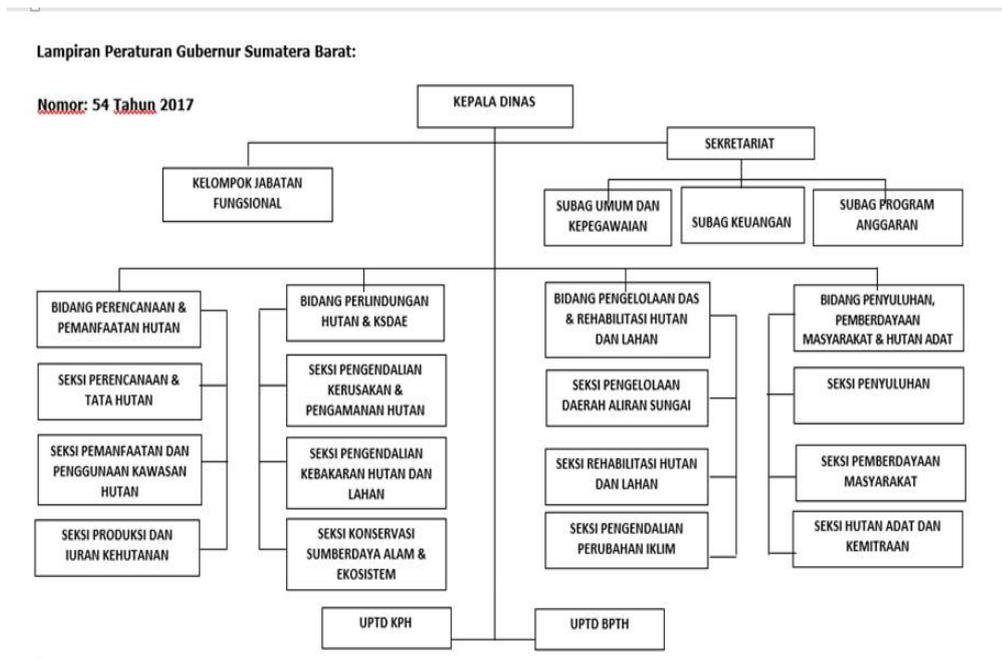
1. Kepala Dinas dijabat oleh Yozarwardi U.P, S.Hut, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Dr. Ferdinal Asmin, S.TP, MP yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Suyatno, B.Sc
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dijabat oleh Purnama, B.Ac
 - c. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dijabat oleh Ita Rahmawati, S.Hut, MM
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Faridil Afrasy, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dijabat oleh Sayogo Hutomo, S.Hut, MP
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si
 - c. Kepala Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan dijabat oleh Adrianto, SH, M.Si
4. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Ir. Ruswin Rustam yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijabat oleh Zarmawandi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dijabat oleh Era Sulatri, S.Hut, M.Si
5. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dijabat oleh Ir. Mgo Senatung, MP yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahary, S.IP
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijabat oleh Dudi Badrudin, S.Hut.T
 - c. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dijabat oleh Muhdian Prasetya D, S.Hut, M.Si

6. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat dijabat oleh Yonefis SH, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan dijabat oleh Boy Martin, SH, M.Si
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Kusworo, SP, M.Si
 - c. Kepala Seksi Hutan Adat dan Kemitraan dijabat oleh Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si
7. Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dijabat oleh Febrina Trisusila Putri, SP, M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Imran, SE
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Benih dijabat oleh Rini Hasmira, SH
 - c. Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih dijabat oleh Mika Lestaria, S.Hut, M.Si
8. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dijabat oleh Bambang Suyono, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Fazul Taufik, ST, M.Eng
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Zeptin Alex Vildiro, S.Hut, MM
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Cucu Sukarna, S.IP
9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya yang dijabat oleh Yandesman, S.Hut yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Rizky Hamid Nasution, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Hendri Dunan, SH
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yuhan Sahri, S.Hut
10. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota yang dijabat oleh Ir. Saidah R. Nauli yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Susi Erienti, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Ismet Fanani, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yogi Wandra, S.Hut
11. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Agam Raya yang dijabat oleh Ir. Afniwirman yang membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dewi Safnita, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Yon Fredy, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Suhet Tarmizi, SP
12. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung yang dijabat oleh Terra Dharma, S.Hut, M.Si yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dian Yulia Widra, S.Hut.T
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Febri Syahli, S.Hut, M.Sc
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Slamet Riyadi, SH
13. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Solok yang dijabat oleh Ir. Refriasel yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Novi Eka Putri, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Bakhrinaldi, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Hendra Bakti Putra, ST
14. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batang Hari yang dijabat oleh Hamdani, S.Sos yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Hasan, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Joni Saputra, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Muhammad Fitriadi, S.Hut
15. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pesisir Selatan yang dijabat oleh Madrianto, S.Hut yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Yusfiandrita, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Andre Das Gomes, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Hendrio Fadly, S.Hut
16. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dharmasraya yang dijabat oleh Drs. Nofdinal Yefri, M.Si yang membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Ir. Evi Yusri, M.Si
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Habibullah, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Fetrinelfa, S.Hut
17. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentawai yang dijabat oleh Tasliatul Fuaddi, S.Hut yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Zunaidi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Pribel Sirait, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Riza Nofa Satria, S.Hut, M.Si

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017
 Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1.6 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mencakup kawasan hutan, sensitivitas kehutanan, penanganan *illegal logging*, rehabilitasi hutan dan lahan, pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil dan industri kehutanan.

Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi keberlanjutan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Kondisi Saat ini

1.6.1.1 Ekologi

Hutan secara ekologis memiliki peran sebagai penyerasi dan penyeimbang ekosistem dan lingkungan global, penyangga sumber kehidupan, dan pengatur tata air. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan **seluas ± 2.380.057 ha (56,27%) dari luas wilayah ± 4.229.730,00 ha** yang terdiri atas :

- ✓ Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 806.939 ha,
- ✓ Hutan Lindung (HL) seluas ± 791.671 ha,
- ✓ Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.211 ha,
- ✓ Hutan Produksi (HP) seluas ± 360.608 ha,
- ✓ Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 187.629 ha, dan
- ✓ Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.849.673 ha.

Melihat komposisi tersebut di atas, kawasan hutan Sumatera Barat didominasi oleh kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam dan hutan lindung yang terhampar di pinggang Bukit Barisan dan merupakan hulu-hulu sungai yang bermuara ke provinsi tetangga (Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Bengkulu). Sumatera Barat memiliki hutan dengan ketererangan lahan yang sebagian besar agak curam dan sangat curam. Hutan Sumatera Barat didominasi oleh berbagai jenis vegetasi perdu hingga pohon-pohonan dan didiami oleh berbagai jenis satwa.

Sebagai salah satu sumber daya produktif, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi "primadona" dalam kerangka Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dengan dijadikannya Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi strategis pengembangan Perhutanan Sosial (PS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan Sosial juga dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah tenurial yang banyak terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Alih fungsi lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan kegiatan pembangunan lainnya di luar bidang kehutanan juga menambah kompleksitas masalah tenurial di Sumatera Barat. Di sisi lain, kepastian batas kawasan hutan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Tidak hanya sebatas itu, dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi dapat mengancam kelestarian hutan.

Di samping itu, bidang kehutanan masih menjadi isu sensitif baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tingginya perhatian multipihak terhadap pengelolaan hutan berpeluang untuk mendorong pengelolaan hutan partisipatif. Untuk itu, pengelolaan hutan harus dikelola secara terpadu dan profesional.

1.6.1.2 Sosial/Ekonomi

Ketentuan terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sudah cukup banyak dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari ketentuan yang ada, pada dasarnya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar penggunaan dan pemanfaatan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional/daerah. Provinsi Sumatera Barat dengan kawasan hutan yang luas memiliki peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan dari ketentuan pengelolaan hutan, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA), Kemitraan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, dan lain-lain sudah mulai digalakkan di Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya tersebut setidaknya dapat mendorong pengelolaan hutan lestari.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Saat ini, pemanfaatan hasil hutan kayu di Provinsi Sumatera Barat diberikan oleh

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 8 (delapan) perusahaan yang terdiri atas 4 (empat) IUPHHK-HA dan 4 (empat) IUPHHK-HT. Untuk itu, pembinaan yang terus-menerus dari Dinas Kehutanan diperlukan agar prinsip kelestarian produksi dan kelestarian sumber daya hutan dalam pelaksanaan IUPHHK dapat tercapai.

Kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan, seperti kayu, ikut mendorong tumbuhnya industri hasil hutan berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/*Sawmill*. Akibat kapasitas industri pengolahan kayu yang tidak disertai dengan kemampuan suplai bahan baku secara lestari dapat memicu peningkatan kasus penjarahan, penyerobotan, dan pengambilan hasil hutan secara ilegal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

1.6.1.3 Kelembagaan

Untuk menjalankan penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia sebanyak 438 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status kepegawaian 435 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian :

1. Sekretariat : 36 orang
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan : 17 orang
3. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat : 16 orang
4. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE : 29 orang
5. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL : 16 orang
6. UPTD BSPTH : 11 orang
7. UPTD KPHL Bukit Barisan : 68 orang
8. UPTD KPHL Agam Raya : 27 orang
9. UPTD KPHL Lima Puluh Kota : 38 orang
10. UPTD KPHP Dharmasraya : 18 orang
11. UPTD KPHP Mentawai : 16 orang
12. UPTD KPHP Pesisir Selatan : 21 orang
13. UPTD KPHL Pasaman Raya : 42 orang
14. UPTD KPHL Sijunjung : 30 orang
15. UPTD KPHL Hulu Batanghari : 20 orang
16. UPTD KPHL Solok : 33 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Doktor : 1 orang

- b. Magister (S2): 35 orang
- c. Sarjana (S1): 171 orang
- d. Diploma (D3): 23 orang
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA): 198 orang
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 7 orang

Dari jumlah tersebut di atas, beberapa orang diantaranya adalah tenaga fungsional tertentu, berupa:

- a. Fungsional Polisi Kehutanan: 118 orang
- b. Fungsional Penyuluh Kehutanan: 49 orang
- c. Calon Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan: 2 orang
- d. Fungsional Perencana: 1 orang
- e. Fungsional Pranata Komputer: 1 orang

1.6.2 Kondisi yang Diharapkan

Sesuai dengan arah kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pelaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan untuk mencapai kondisi yang mendukung terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, baik secara ekologi, sosial/ekonomi, maupun secara kelembagaan. Secara rinci, kondisi dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1.6.2.1 Ekologi

Kondisi ekologi yang diinginkan antara lain adalah seimbangnya ekosistem hutan dalam menyangga kehidupan manusia, khususnya melalui pemantapan batas kawasan hutan dan meningkatnya pengakuan keberadaan kawasan hutan oleh para pihak, sehingga diharapkan dapat : (1) menurunnya praktek-praktek *illegal logging*, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta perdagangan kayu ilegal, (2) terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, (3) terciptanya prakondisi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan (4) meningkatnya fungsi hutan dan lahan yang telah terdegradasi melalui dukungan informasi dan perencanaan kehutanan yang lengkap dan terpadu.

1.6.2.2 Sosial/Ekonomi

Kondisi sosial/ekonomi yang diinginkan antara lain adalah: (1) meningkatnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (2) meningkatnya

minat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemahaman para pihak terkait hutan dan kehutanan, (3) terciptanya prakondisi mitigasi perubahan iklim sehingga diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), (4) meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (5) terpenuhinya penyediaan kayu dari hutan tanaman, restrukturisasi industri dan optimalisasi industri perkayuan dan hasil hutan lainnya yang berorientasi pada pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi penggunaan bahan baku hasil hutan, dan (6) berkembangnya usaha-usaha kehutanan seperti HHBK serta pembibitan dan perbenihan tanaman hutan.

1.6.2.3 Kelembagaan

Kondisi kelembagaan yang diinginkan antara lain : (1) meningkatnya kemampuan struktural dan fungsional organisasi, (2) tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan (3) terciptanya koordinasi yang mantap dengan pusat dan kabupaten/kota dalam pembangunan kehutanan.

1.7 PENINGKATAN SISTEM AKIP DAN INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui implementasi ISO 9001:2015. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2015 dari Tuv Rheinland yang merupakan lembaga sertifikasi ISO pada bulan Januari 2018. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur

(SOP) seperti yang tertuang dalam dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi seluruh sasaran mutu waktu pelayanan yang juga tertuang pada dokumen di atas. Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Hal ini menguatkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan *Good Governance and Clean Government*. Inovasi lain yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dalam skema Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
2. Penyusunan Perda Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan, yang diimplementasikan dengan dibentuknya Satgas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
3. Peta Interaktif Simpanan Karbon (Pinsica) merupakan peta interaktif yang menginformasikan jumlah simpanan karbon pada areal kelola Perhutanan Sosial Sumatera Barat. Peta ini dapat menginformasikan jumlah simpanan karbon untuk setiap jenis tutupan lahan. Peta ini dapat diakses melalui website <http://arcg.is/PGef5>.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu “**Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan tahun 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah prioritas 10 yaitu pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan satu tujuan berdasarkan rekomendasi Tim Penguatan SAKIP melalui Surat Keputusan Gubernur yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2018
1. Memberikan kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya 2. Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan 4. Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	1. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari. 2. Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan 2. Meningkatnya kinerja organisasi

2.2.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada bulan November 2019 dan evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat pada bulan Desember 2019 maka IKU Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang awalnya berjumlah sembilan IKU menjadi lima IKU.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100		
			Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	-	-	-		
			Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	%	80	81	82	83	84	85		
		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09	-	-	-		
			Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	10	12	14	15		
			Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	45	-	-	-		
		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5,32	8,50	11,68	14,86	18,03	21,21		
		2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
					Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	95%	95%	95%	-	-	-

2.2.3 CARA MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per

tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW Subtansi Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Pemantapan Kawasan Hutan (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 2. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya 3. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya 4. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari 5. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota 6. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai 7. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya 8. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan 9. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung 10. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok 11. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengusahaan dan Penatausahaan Hasil Hutan serta Industri Kehutanan	<p>2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)</p> <p>3. Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD)</p>	<p>12. Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan</p> <p>13. Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial</p> <p>14. Supervisi dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan</p> <p>1. Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi</p> <p>1. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya</p> <p>2. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya</p> <p>3. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung</p> <p>4. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota</p> <p>5. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai</p> <p>6. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya</p> <p>7. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan</p> <p>8. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada</p>

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				Wilayah Kelola KPH Sijunjung 9. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok 10. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan 11. Pembinaan PNBSP Sektor Kehutanan Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya 12. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya 13. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari 14. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota 15. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai 16. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya 17. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan 18. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung 19. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok 20. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan 21. Pengembangan Kemitraan Kehutanan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya 22. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari 23. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				<p>pada Wilayah KPH Limapuluh Kota</p> <p>24. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai</p> <p>25. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan</p> <p>26. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok</p> <p>27. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan</p> <p>28. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan</p>
<p>Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat</p>	<p>Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim</p>	<p>Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk Menunjang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	<p>1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (APBD)</p>	<p>1. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya</p> <p>2. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya</p> <p>3. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari</p> <p>4. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota</p> <p>5. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai</p> <p>6. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya</p> <p>7. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan</p> <p>8. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung</p> <p>9. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok</p> <p>10. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan</p> <p>11. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya</p> <p>12. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph dharmasraya</p> <p>13. Patroli dan operasi</p>

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph hulu batang hari 14. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai 15. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya 16. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan 17. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph sijunjung 18. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph solok 19. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan 20. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota 21. Pengamanan dan Perlindungan Hutan 22. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 23. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 24. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 25. Pengukuran Simpanan Karbon 26. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 27. Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan
	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Penyediaan bibit dan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (APBD)	1. Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5 2. Konservasi Sumber Daya Genetik 3. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan 4. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 5. Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan (APBD)	6. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL 7. Rehabilitasi Hutan an Lahan Di Luar Kawasan Hutan 1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya 2. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya 3. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari 4. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota 5. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai 6. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya 7. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan 8. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung 9. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok 10. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan 11. Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Skema HTR, HN dan HKm	1. Program Perhutanan Sosial (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya 2. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai 3. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya 4. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan 5. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan 6. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya 7. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya 8. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari 9. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota 10. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya 11. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung 12. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok 13. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan 14. Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				<p>15. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan</p> <p>16. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan</p> <p>17. Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan</p> <p>18. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya</p> <p>19. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya</p> <p>20. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung</p> <p>21. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya</p> <p>22. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari</p> <p>23. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan,</p>

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				<p>Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota</p> <p>24. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan</p> <p>25. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok</p> <p>26. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan</p> <p>27. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan</p> <p>28. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove</p> <p>29. Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat</p>
			2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	<p>1. Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan</p> <p>2. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial</p>

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Meningkatnya tata kelola organisasi	Percepatan Proses SPJ, Pelaporan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Internal Dinas Kehutanan	Peningkatan Kinerja Dinas Kehutanan pada Setiap Bidang dan Perencanaan Setiap Kegiatan yang Lebih Baik	<ol style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 2. Penatausahaan Keuangan SKPD 3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD 4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
			6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan 2. Pengembangan Data Dan Informasi Kehutanan 3. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan

Sumber: Revisi Rencana Strategis Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan pemberi amanah, yaitu Gubernur Sumatera Barat, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan tim evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tim evaluasi Biro Organisasi setda Provinsi Sumatera Barat. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, indikator dan target tahunan dalam perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya b. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	100% 83%
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	a. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	12%
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14,86%
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB

2.4 RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun 2019 adalah tahun keempat untuk Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW substansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
II	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	2. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan 1. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	83% 12%	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan. Penguatan partisipasi masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Penyediaan bibit dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan	(APBN) 3. Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD) 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (APBD) 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (APBD) 3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan (APBD)
III	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14,86%	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)
IV	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (APBD) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (APBD) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (APBD) 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (APBD) 6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (APBD)

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

2.5 RENCANA KINERJA KEGIATAN

Dalam implementasinya, Rencana Kinerja Sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program pembangunan kehutanan maupun program pendukung lainnya yang terdiri atas kegiatan pembangunan kehutanan maupun kegiatan pendukung sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Secara ringkas, Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target
	DINAS KEHUTANAN		
1	NON URUSAN		
1	PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%
	1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 Bulan
	2 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan
	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan
	4 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan
	5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	23 unit
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan
	7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik, dan telekomunikasi OPD terpenuhi	12 Bulan
	8 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 Bulan
	9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan
	10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan
	11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/rapat yang diselenggarakan	12 Bulan
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang diikuti	12 Bulan
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Dinas Kehutanan dan UPTD Dinas Kehutanan yang terpelihara	3 unit
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 bulan
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	42 unit
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	287 unit

	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	2 unit
	6	Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi	5 unit
	7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	40 unit
3		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kebutuhan pakaian dinas PNS/ non PNS yang terpenuhi	510 orang
4		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	100%
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	16 Kali
5		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%
	1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan	10 UPTD KPH
	2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Honor KPA, PPTK dan PA serta pengelola keuangan SKPD lainnya yang terbayarkan	12 Bulan
	3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelolaan aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan
	4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5 Dok
	5	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	5 Dok
2		KEHUTANAN		
	1	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%
	1	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	Terlaksananya implementasi ISO 9001 : 2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Laporan
	2	Pengembangan Data Dan Informasi Kehutanan	Jumlah data dan informasi kehutanan yang dikembangkan	2 Laporan
	3	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Jumlah Neraca Sumber Daya Hutan yang tersusun	1 buku
2		PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	12%
	1	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	1 Lokasi
	2	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi	1 Lokasi
	3	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi	1 lokasi
	4	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi	1 lokasi
	5	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	wilayah kelola KPH Mentawai yang diKonservasi	1 lokasi
	6	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi	1 Lokasi
	7	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi	1 lokasi

	8	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi	1 Lokasi
	9	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi	1 lokasi
	10	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi	2 lokasi
	11	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	25 kali
	12	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph dharma raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Dharma Raya	15 kali
	13	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph hulu batang hari	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	15 kali
	14	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai	20 kali
	15	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	30 kali
	16	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	15 kali
	17	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph sijunjung	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH sijunjung	15 kali
	18	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph solok	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok	15 kali
	19	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan	20 kali
	20	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota	20 kali
	21	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 kasus
	22	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 unit
	23	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Pengembangan Potensi Jasa lingkungan yang di fasilitasi	1 lokasi
	24	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	1 Laporan
	25	Pengukuran Simpanan Karbon	Tersedianya data simpanan karbon	20 petak
	26	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi SDA	450 orang
	27	Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan	Peta Laju Kerusakan hutan yang tersusun	6 peta

3		PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	50%
	1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya	20 kali
	2	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Dharmasraya	20 kali
	3	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	20 kali
	4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota	20 kali
	5	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	Jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Mentawai	20 kali
	6	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya	20 kali
	7	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan	12 kali
	8	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Sijunjung	20 kali
	9	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Solok	20 kali
	10	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan	25 kali
	11	Supervisi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	23 kali
4		REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase penurunan luas lahan kritis	2%
	1	Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	10 lokasi
	2	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik	2 unit
	3	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	250000 batang
	4	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	6 Sertifikat/2 buku
	5	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terevaluasinya kinerja pengelolaan DAS dan tersusunnya dokumen DAS	2 DAS
	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL	Dokumen perencanaan RTn RL dan RPRL yang tersusun	2 Buku
	7	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Luar Kawasan Hutan	Terehabilitasinya lahan kritis di luar kawasan hutan	180 hektar

5	PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	Nilai PNPB sektor kehutanan dari HHK dan HHBK	83%
1	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	2 Petak
2	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	2 petak
3	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	2 petak
4	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	26 Unit
5	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Mentawai	10 Unit
6	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	5 Unit
7	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	3 Unit
8	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 Unit
9	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Solok	2 Unit
10	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	4 Unit
11	Pembinaan PNPB Sektor Kehutanan	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNPB sektor Kehutanan	10 UPTD KPH
12	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komoditi
13	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 Komoditi
14	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 Komoditi
15	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 Komoditi
16	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	1 Komoditi
17	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komoditi
18	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 Komoditi
19	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 Komoditi

	20	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 Komoditi
	21	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah Potensi hasil hutan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 Komoditi
	22	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 Unit
	23	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	2 petak
	24	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	2 petak
	25	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	2 petak
	26	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	2 petak
	27	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	2 petak
	28	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	2 petak
	29	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	3 petak
	30	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan insutri kehutanan	20 Kali
6		PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14,86%
	1	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Kali
	2	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 kali
	3	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali
	4	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kali
	5	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Kali
	6	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	1 Unit
	7	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	1 unit
	8	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	1 Unit
	9	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	1 unit

	10	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	1 Unit
	11	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	1 Unit
	12	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 unit
	13	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 unit
	14	Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Jumlah pengelola perhutanan sosial yang mengikuti forum	110 Orang
	15	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	75 orang
	16	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah SDM pengelola Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	180 orang
	17	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	5 Kelompok
	18	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 Kelompok
	19	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 Kelompok
	20	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 Kelompok
	21	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelompok
	22	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari	3 Kelompok

	23	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 Kelompok
	24	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 Kelompok
	25	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 Kelompok
	26	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang di fasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 Kelompok
	27	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 Kali
	28	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove	5 Kali
	29	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah supervisi, Bimtek dan Pembinaan kegiatan penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	20 Kali
7		PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
	1	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km
	2	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Agam Raya	3 unit
	3	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit
	4	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit
	5	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Lima puluh kota	2 unit
	6	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola Mentawai	2 unit
	7	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	4 unit

	8	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 unit
	9	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Sijunjung	2 unit
	10	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Solok	4 unit
	11	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	8 unit
	12	Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 buku
	13	Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Jumlah sosialisasi identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial yang dilaksanakan	20 kali
	14	Supervisi dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	20 kali

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Jumlah pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 105.119.812.886,- dan berubah menjadi Rp. 99.530.301.397,- atau naik 3,53%, yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci, Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	46.361.827.947	46,58
2	Belanja Langsung	53.168.473.450	53,42
Jumlah		99.530.301.397	100.00

Sumber: APBD Perubahan Sumbar 2019

Dari alokasi anggaran belanja di atas, dilihat dari proporsi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019, porsi Belanja Langsung pada tahun 2019 turun sebesar 2,21% dari 55,62% pada tahun 2018 menjadi 53,42% pada tahun 2019. Sementara Belanja Tidak Langsung naik sebesar 2,21% dari 44,37% pada tahun 2018 menjadi 46,58% pada tahun 2019. Hal ini berarti alokasi untuk pembangunan kehutanan pada tahun 2019 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2018, yang ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan

(Belanja Langsung) dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung).

Alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kehutanan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran 2019		Anggaran 2018	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	- Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	707.766.000	1,33	1.184.109.440	2,06
		- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	8.179.028.950	15,38	9.880.165.060	17,21
2.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	- Persentase penurunan laju kerusakan hutan	31.600.512.250	59,43	33.882.486.345	59,04
3.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat	- Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	4.623.977.000	8,70	4.937.286.025	8,60
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	8.057.189.250	15,15	7.508.406.034	13,09
Jumlah Belanja Langsung			53.168.473.450	100,00	57.392.452.904	100,00

Pada Tabel 9 di atas, jumlah belanja langsung sebesar Rp 53.168.473.450,- atau turun 7,94% dari anggaran tahun 2018 dengan persentase terbesar anggaran adalah untuk mendukung sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat yaitu sebesar 59,43% atau naik 0,66% dari Tahun 2018. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yaitu sebesar 16,71% atau turun 2,56% dari tahun 2018. Sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yaitu sebesar 15,15% atau naik 2,06% dari tahun 2018 dan sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan sebesar 8,70% atau naik 0,10% dari tahun 2018.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Untuk membangun akuntabilitas kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2015 dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada Tabel 10.

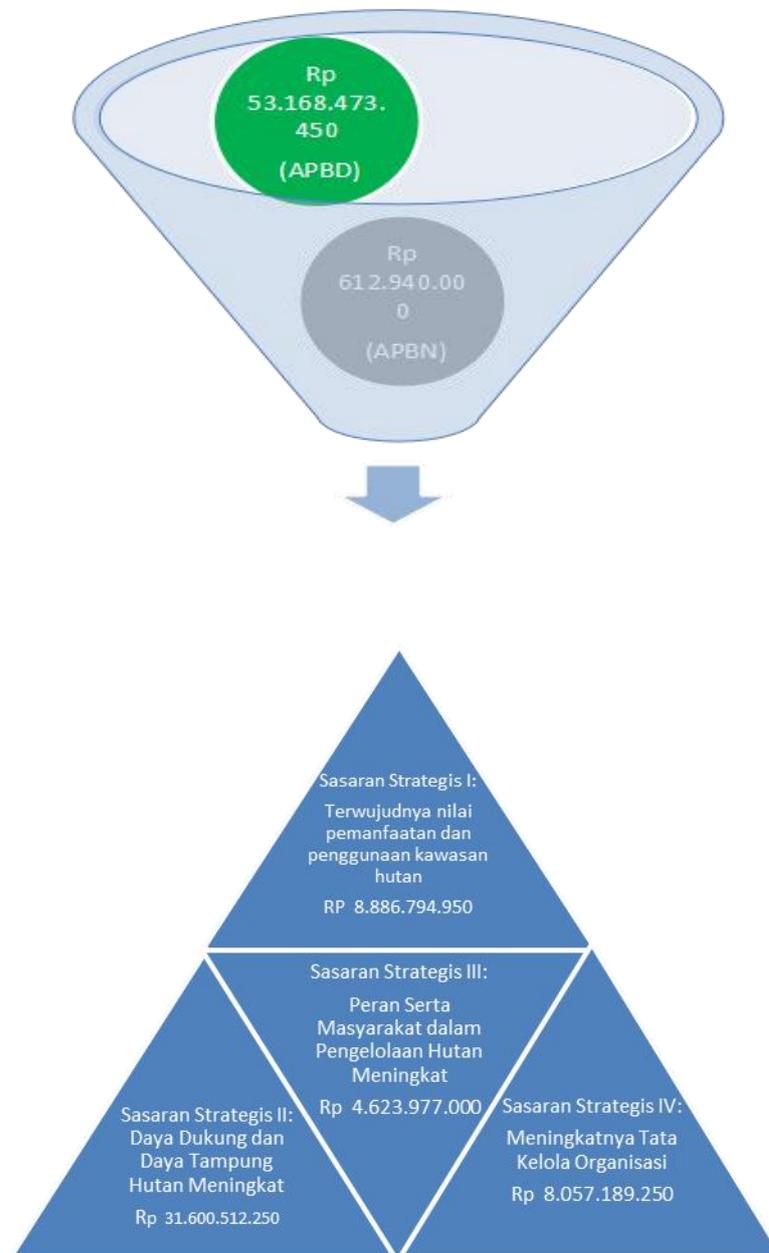
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	< 53%	Gagal	

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

ANGGARAN 2019



Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11.

Tabel 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
1.	Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
		Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	83%	84,55%	101,87	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					100,94	
2.	Daya dukung daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas kerusakan hutan	12%	12,45%	103,75	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					103,75	
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14,86%	18,01%	121,20	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					121,20	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	A	102,10	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					102,10	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					106,99	

Sumber: Diolah dari data primer, penetapan kinerja, dan *monev* pembangunan kehutanan 2019

Dari Tabel 11 di atas, hasil pengukuran kinerja menunjukkan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 106,99% yang termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Dari lima Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada Tabel 11 secara umum dapat mencapai kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target). Capaian realisasi indikator tertinggi adalah persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Selain sebagai dampak dari kebijakan/program/kegiatan perhutanan sosial yang

dilakukan secara intensif, hal ini juga didukung dengan adanya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan perhutanan sosial mengingat dukungan areal kelola yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor pangan, sektor energi terbarukan, pariwisata, desa tertinggal, pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif.

Hasil pencapaian kinerja pada Tabel 11 di atas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan diatas merupakan hasil realisasi program/ kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 11, selanjutnya sub bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

I. Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan

Tujuan **Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan empat Sasaran Strategis. Sasaran Strategis I yaitu **Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan** dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tujuan, Sasaran Strategis 1 dan Indikator Kinerja Utama 1,2

“Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat adalah $\pm 2.380.057$ Ha atau 56,27% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ($\pm 4.229.730$ Ha) dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung (± 791.671 Ha) dan Hutan Produksi (± 360.608 Ha), memiliki potensi hutan yang harus dimanfaatkan, baik hasil hutan maupun penggunaan kawasan hutan secara optimal. Nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan merupakan satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan. Jika produktivitas hutan meningkat maka diharapkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari Sasaran Strategis 1 disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
		2. Nilai PNBP sektor kehutanan	83%	84,55%	101,87
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					100,94

Dari Tabel 12 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I pada tahun 2019 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran 102,11% atau

turun 1,17% dari tahun sebelumnya termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 100,94% di atas adalah potensi kawasan hutan Sumatera Barat telah dimanfaatkan dengan optimal dan sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 dan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2017	Target 2018	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
				2018 (n-1)	2018 (n-1)	2019 (n)	2019 (n)
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100%	100	100%	100
	2. Nilai PNBP sektor kehutanan	82%	83%	76,26%	93,00	84,55%	101,87

Dari Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya terealisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Indikator kinerja 2 yaitu Nilai PNBP Sektor Kehutanan terealisasi 101,87% atau naik 8,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari realisasi dua indikator kinerja di atas artinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah optimal dan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 s.d Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3, 4, 5 dan 6 berikut:

IKU 1



Gambar 3. Realisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016 - 2019



Gambar 4. Capaian kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016 – 2019

IKU 2



Gambar 5. Realisasi Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2019



Gambar 6. Capaian kinerja Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 – 2019

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
	2.Nilai PNBPN sektor kehutanan	85%	84,55%	99,47

Dari Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja 1 dan 2 jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya pada tahun keempat Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 100% sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 100%, hal ini disebabkan hingga akhir Renstra target capaian indikator kinerja di atas tetap 100%.
- b. Indikator kinerja 2 yaitu Nilai PNBPN sektor kehutanan pada tahun keempat Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 99,47% atau masih dibawah target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Namun pada tahun keempat RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 indikator kinerja 2 memiliki target yaitu 97,65% artinya capaian indikator kinerja 2 pada tahun 2019 lebih tinggi 1,82% dari tingkat kemajuan yang seharusnya dicapai tahun ini.

Dari realisasi kedua indikator kinerja di atas, pada Tahun 2019, capaian indikator kinerja 1 dan 2 pada sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja tahun keempat RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Ket
		Sumbar 2019	Sumbar 2018	KemenLH K 2018	
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	-	Belum ada data
	2.Nilai PNBK sektor kehutanan	84,55%	76,26%	-	Belum ada data

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas tidak dapat dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan tidak adanya data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk target indikator kinerja 1 dan 2.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2019		Ket
		Sumbar	Sumut	
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	Sama
	2.Nilai PNBK sektor kehutanan	84,55%	101,94	Lebih Rendah

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja 1 untuk Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat realisasinya sama dengan Provinsi Sumatera Utara, artinya pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Capaian indikator kinerja 2, Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat hal ini artinya nilai PNBK Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PNBK Sumatera Barat. Hal ini dimungkinkan dikarenakan luas hutan produksi/IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam)/IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman) di Provinsi Sumatera Utara lebih luas/banyak dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui tiga program yang terdiri atas dua program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN. Program dimaksud adalah:

1. Program Pemantapan kawasan (APBD) yang terdiri atas empat belas kegiatan yaitu:

- a. Pemeliharaan batas kawasan hutan
 - b. Pengendalian perencanaan dan tata hutan
 - c. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya
 - d. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya
 - e. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari
 - f. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota
 - g. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai
 - h. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya
 - i. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan
 - j. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung
 - k. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok
 - l. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan
 - m. Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
 - n. Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri atas satu sub kegiatan, yaitu Koordinasi Pengelolaan KPH dalam Rangka Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (KTH)/ Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan.
 3. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan yang terdiri atas tiga puluh dua kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan

- e. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung
 - f. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok
 - g. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
 - h. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan
 - i. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya
 - j. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya
 - k. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung
 - l. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya
 - m. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari
 - n. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota
 - o. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai
 - p. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan
 - q. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok
 - r. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan
 - s. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya
 - t. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
 - u. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
 - v. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota
 - w. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
 - x. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
 - y. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
 - z. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung
 - aa. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok
 - ab. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
 - ac. Pengembangan Kemitraan Kehutanan
 - ad. Pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan - alat ekonomi produkti (DAK)
 - ae. Pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH-Wisata (DAK)
 - af. Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan
- Secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran

melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dari Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Pemantapan kawasan hutan	1	Pemeliharaan batas kawasan hutan	Terpeliharanya Batas Kawasan Hutan	70 Km	70 Km	100%	
				2	Pengendalian perencanaan dan tata hutan	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 Buku	1 Buku	100%	
				3	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Agam Raya	3 unit	3 unit	100%	
				4	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit	2 unit	100%	
				5	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	2 unit	100%	
				6	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Lima puluh kota	2 unit	2 unit	100%	
				7	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di KPH Mentawai	2 unit	2 unit	100%	
				8	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkontrol di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	2 unit	2 unit	100%	

		9	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendali kan di KPH Pesisir Selatan	1 unit	1 unit	100%		
		10	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendali kan di wilayah kelolaan KPH sijunjung	2 unit	2 unit	100%		
		11	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendali kan di KPH Solok	4 unit	4 unit	100%		
		12	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendali kan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	8 unit	8 unit	100%		
		13	Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah supervisi pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	20 kali	20 kali	100%		
		14	Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	20 Kali	20 Kali	100%		
	b Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	15	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	26 Unit	26 Unit	100%	
			16	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah	10 Unit	10 Unit	100%	

		Kelola KPH Mentawai				
	17	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	5 Unit	5 Unit	100%
	18	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	3 Unit	3 Unit	100%
	19	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	2 Unit	2 Unit	100%
	20	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Solok	2 Unit	2 Unit	100%
	21	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	4 Unit	4 Unit	100%

				22	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan industri kehutanan	20 Kali	20 Kali	100%	
				23	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan dimanfaatkan	2 Petak	2 Petak	100%	
				24	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	
				25	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	
				26	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	
				27	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	
				28	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	
				29	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	
				30	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	
				31	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan dimanfaatkan	2 petak	2 petak	100%	

			32	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan dimanfaatkan	3 petak	3 petak	100%	
			33	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	1 komo diti	1 komo diti	100%	
			34	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	
			35	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	
			36	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	
			37	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	
			38	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	1 komo diti	1 komo diti	100%	
			39	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	
			40	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	
			41	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	
			42	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	1 Komo diti	1 Komo diti	100%	

				43	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	4 Unit	4 Unit	100%	
				44	Pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan - alat ekonomi produksi (DAK)	Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks gini	15 unit	15 unit	100%	
				45	Pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH-Wisata (DAK)	Operasional KPH untuk peningkatan PAD melalui wisata	5 unit	5 unit	100%	
				46	Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor Kehutanan	10 kab/kota	10 kab/kota	100%	

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" memiliki target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator ini dihitung dengan formula luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada Tahun 2019 dibagi dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada Tahun 2019 dikalikan angka 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 17 di atas. Capaian Target IKU persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Tahun 2019 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya per Triwulan Tahun 2019.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	Capaian %	TRW II	Capaian %	TRW III	Capaian %	TRW IV	Capaian %
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	0%	70%	100%	100%	0%	100	70%	100	100%	100	100%	100

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai dengan perizinan yang diberikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pesatnya perkembangan pembangunan kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan, pengelolaan hutan melalui IUPHHK-HA/HTI, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema Perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat mendorong perlunya dilakukan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peruntukan dan perizinannya serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan. Pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 178 unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
1.	Bupati Pasaman Barat	Pembangunan Pelabuhan Umum dan jalan Teluk Tapang – Air Bangis	122,01	HP dan HL	Sesuai
2.	PT. Gamindra Mitra Kesuma	Operasi Produksi Biji Besi dan Jalan Tambang	102,22	HPT	Sesuai
3.	LAPAN	Lokasi pengamatan Atmosfer	17,17	HPT	Sesuai
4.	Bupati Lima Puluh Kota	Pembangunan jalan menuju Transmigrasi Koto Tengah	8,37	HPK	Sesuai
5.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Pembangunan jalan menuju lokasi Transmigrasi Padang Tarok	14,48	HPK	Sesuai
6.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Aie Luo – Kipek	184,25	HPK	Sesuai
7.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Sapan - Air Dingin	0,571	HPT	Sesuai
8.	Bupati Solok	Pembangunan jalan ruas Garabak Data-Batu Bajanjang	11	HL Batang Palangki	Sesuai
9.	Walikota Padang	Pembangunan jalan Bungus-Kalampaian	17,05	HL	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Padang Pariaman	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Air Bersih	0,0575	HL Barisan I	Sesuai
11.	PT Galian Endapan Buana	Pertambangan galena	153,89	HP	Sesuai
12.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembangunan Instalasi Listrik Biomassa	5,29	HP	Sesuai
13.	PT Semen Padang	Tambang Batu Kapur	242,3	HPT	Sesuai
14.	PT Allied Indo Coal Jaya	Tambang Batubara	368,96	HP Serasah	Sesuai
15.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Pembangunan Embung	3,65	HPK	Sesuai
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Prov. Sumbar	Rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Batang Sangki I	2,7	HL	Sesuai
17.	PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SBS	Pembangunan PLTU	51,19	HL	Sesuai
18.	PT PLN (Persero)	SUTT dan Tapak Tower Ombilin - Kiliran Jao	18,37	HL & HP	Sesuai
19.	PT Multi Energi Dinamika	PLTM Tarusan	4,5	HL	Sesuai
20.	PT PLN (Persero)	Transmisi SUTET	25,78	HL dan HP	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar	275 Kv GI Padang Sidempuan - GI Payakumbuh Pembangunan terowongan jalan Balingka-Sianok	2,0	HL	Sesuai
22.	PT ANDALAS MERAPI TIMBER Camp Barikan – sangir Jujuhan Solse	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 28.840	HP	Sesuai
23.	PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA Camp Tiniti – Siberut Barat	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 47.605	HP	Sesuai
24.	PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA Camp Padang Tarok – Sijunjung	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 28.885	HP	Sesuai
25.	PT. MINAS PAGAI LUMBER Camp Pulaga – Sikakap	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 78.000	HP	Sesuai
26.	PT. BUKIT RAYA MUDISA Km. 7 Camp Muara Takung – Sijg	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	± 28.617	HP	Sesuai
27.	PT. DHARA SILVA LESTARI Kenagarian Bonjol – Koto Baru	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	± 13.805,17	HP	Sesuai
28.	PT. SUKSES JAYA WOOD Kenagarian Lunang – Silaut	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	1.583,90	HP	Sesuai
29.	Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan	Pembangunan Jalan Tanjung Durian - Talantam	12,83	HL dan HPT	Sesuai
30.	PT. Dempo Sumber Energi	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Pelangai Hulu dan Sarana Penunjangnya	54,18	HPT dan HPK	Sesuai
31.	PT. Bumi Indonesia Bersinar	Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya	348,62	HPT	Sesuai
32.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan/Pening katan Kualitas Jalan Trans Mentawai	254,24	HP dan HPK	Sesuai
33.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pembangunan Jalan Kabupaten	89,90	HP dan HPK	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
34.	PT. Biomass Andalan Energi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Alam (IUPHHK-HTI)	± 19.875	HP	Sesuai
35.	1. LPHN Simanau 2. LPHN Sirukam 3. LPHN Sungai Abu 4. LPHN Sariak Alahan Tigo 5. LPHN Simancuang 6. LPHN Pulakek Koto Baru 7. LPHN Pakan Rabaa 8. LPHN Pasir Talang Timur 9. LPHN Koto Baru 10. LPHN Ranah Pantai Cermin 11. LPHN Padang Limau Sundai 12. LPHN Sako Utara Pasie Talang 13. LPHN Lubuk Gadang Selatan 14. LPHN Pakan Rabaa Timur 15. LPHN Padang Air Dingin 16. LPHN Padang Gantiang 17. LPHN Pakan Rabaa Tengah 18. LPHN Lubuk Malako 19. LPHN Paru 20. LPHN Muaro Takung 21. LPHN Lubuk Tarantang 22. LPHN Manganti 23. LPHN Sungai Betung 24. LPHN Aie Angek 25. LPHN Langki 26. LPHN Sisawah 27. LPHN Timbulun 28. LPHN Pulasan 29. LPHN Silongo 30. LPHN Kampung Dalam	Hutan Nagari (HN)	176.620	HL,HP	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
31.	LPHN Sumpur Kudus				
32.	LPHN Tanjung Bonai Aur				
33.	LPHN Unggan				
34.	LPHN Buluh Kasok				
35.	LPHN Lubuk Tarok				
36.	LPHN Silantai				
37.	LPHN Air Bangis				
38.	LPHN Katiagan				
39.	LPHN Simpang				
40.	LPHN Muaro Sei Lolo				
41.	LPHN Tanjung Betung				
42.	LPHN Ganggo Mudiak				
43.	LPHN Padang Mentinggi				
44.	LPHN Muara Tais				
45.	LPHN Alahan Mati				
46.	LPHN Silayang				
47.	LPHN Koto Nopan				
48.	LPHN Jambak				
49.	LPHN Lubuk Gadang				
50.	LPHN Limo Koto				
51.	LPHN Pintu Gadang				
52.	LPHN Gunung Selasih				
53.	LPHN Lubuk Karak				
54.	LPHN Pagadih				
55.	LPHN Padang Tarok				
56.	LPHN Simarasok				
57.	LPHN Koto Kaciak				
58.	LPHN Lubuk Basung				
59.	LPHN Baringin				
60.	LPHN Kamang Hilia				
61.	LPHN Sitalang				
62.	LPHN Koto Rantang				
63.	LPHN Pasia Laweh				
64.	LPHN Kamang Mudiak				
65.	LPHN Sungai				

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
36.	Buluh	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	28.418	HL,HP	Sesuai
	66. LPHN Sungai Rimbang				
	67. LPHN Tach Bukik				
	68. LPHN Kubang				
	69. LPHN Taram				
	70. LPHN Kurai				
	71. LPHN Sungai Balantiak				
	72. LPHN Pandam Gadang				
	73. LPHN Banja Laweh				
	74. LPHN VII Koto Talago				
	75. LPHN Sialang				
	76. LPHN Baruah Gunung				
	77. LPHN Harau				
	78. LPHN Koto Tinggi				
	79. LPHN Simpang Kapuak				
	80. LPHN Balai Panjang				
	81. LPHN Halaban				
	82. LPHN Sari Lamak				
	83. LPHN Batipuah Baruah				
	84. LPHN Kambang Timur				
	85. LPHN Lunang				
	86. LPHN Lunang Tengah				
	87. LPHN Kapujan Koto Berapak				
	88. LPHN Barung2 Belantai Selatan				
	89. LPHN Pondok Parian Lunang				
	90. Kampung Baru Korong				
	91. LPHN Taratak Sungai Lundang				
	92. LPHN Surian				
	1. HKm Maju Bersama				
	2. HKm Gunung Leco				
	3. HKm Famili Sakato				
	4. HKm Talago Bawah Gunung				
	5. HKm Ingin Makmur				
	6. HKm ICU				
	7. HKm Pasada Roha Bulu Laga				

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
8.	HKm Marguna Alam				
9.	HKm Situak				
10.	HKm Roba Julu				
11.	HKm Gunung Sigantang				
12.	HKm Suka Menang Aia Kacang				
13.	HKm Saiyo				
14.	HKm Rap Hita Saiyo				
15.	HKm Tombang Pinang				
16.	HKm Harapan Baru				
17.	HKm Karya Setia				
18.	HKm Pangduhu Maju				
19.	HKm Sontra				
20.	HKm Beringin Sakti				
21.	HKm Bukit Lestari				
22.	HKm Patamuan Saiyo				
23.	HKm Musus Saiyo				
24.	HKm Harapan Jaya Batu Ampar				
25.	HKm Wana Lestari				
26.	HKm KSU Solok Rajo				
27.	HKm KSU-ED Tabek				
28.	HKm Aur Serumpun				
29.	HKm Leter W				
30.	HKm Sialangan				
31.	HKm Pasir Putih				
32.	HKm Sungai Tuo				
33.	HKm Batu Bapayuang				
34.	HKm Tataye Sakato				
35.	HKm Lurah Basuang				
36.	HKm Tak Boncah Batu Badaguak				
37.	HKm Padang Jariah				
38.	HKm Sikayan Balumuik				
39.	HKm Simpang Tanjung				

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
	40. HKm Sungai Abu Mandiri				
	41. HKm Saiyo Sakato				
	42. HKm Rambaian Manduang				
	43. HKm Kubuak				
	44. HKm Kampung Malayu Saiyo				
	45. HKm Tetesan Embun				
	46. HKm Agroforestri Aro Sepakat				
32.	KTH Minang Saiyo, KTH Giat Bersama, KTH Mekar Jaya, KSU Air Bangis	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	6.935	Hutan Produksi	Sesuai
37.	KTH Putra Andam KTH Usaha Bersama	Kemitraan	404	Hutan Produksi	Sesuai
JUMLAH			461.703,65		

Dari Tabel 19 diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 178 unit/perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat atau naik 12,66% (20 unit) dari tahun 2018 yang terdiri atas 26 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 92 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 46 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 2 unit memanfaatkan Kawasan hutan untuk kemitraan. Sebanyak 178 unit/perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

2. Indikator Nilai PNBP Sektor Kehutanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ” Nilai PNBP Sektor Kehutanan” memiliki target sebesar 83%, terealisasi sebesar 84,55% dengan tingkat capaian 101,87% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator ini dihitung dengan formula jumlah realisasi nilai PSDH dan DR dibagi dengan jumlah target nilai PSDH dan

DR dibagi angka 100%. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. Capaian Target IKU Nilai PNBP Sektor Kehutanan Tahun 2019 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Capaian Target IKU Nilai PNBP Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Nilai PNBP sektor kehutanan	20%	40%	60%	83%	15%	75,00	40%	100%	59%	98,33	84,55%	101,87

Dari Tabel 20 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja “Nilai PNBP Sektor Kehutanan” setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali pada Triwulan I dan III terealisasi dibawah target hal ini disebabkan pada TW I pemegang izin pemanfaatan hasil hutan belum melakukan kegiatan secara optimal dikarenakan masih dalam persiapan/perencanaan produksi sedangkan TW III deviasi realisasi terhadap target hanya 1,67% artinya tidak terlalu jauh dari realisasi target yang ditentukan. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja ini sudah baik dan sudah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan sebagaimana yang disarankan pada Laporan Kinerja Tahun 2018 dikarenakan pada Tahun 2018 indikator kinerja ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Diantaranya adalah monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP sektor kehutanan sudah dilakukan pada tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan sehingga pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan lebih intensif dan efektif kepada unit pemegang izin pemanfaatan hasil hutan. Hal ini perlu dipertahankan oleh seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terutama unit kerja terkait.

Untuk mencapai target kinerja indikator ”Nilai PNBP Sektor Kehutanan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan.

PNBP sektor kehutanan harus dimonitor agar sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Pada tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan

monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNPB sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Target dan Realisasi PNPB Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2019

NO	NO KODE	KABUPATEN / KOTA	TARGET TAHUN 2019						REALISASI PSDH-DR Jan 2018 s/d Des November 2019 Tambah November-Desember 2018				
			PROD			PSDH	DR	DR	PSDH	PSDH	DR	DR	
			HHK	ACASIA	HHBK	(Rp)	US\$	Rp	(Rp)	(Rp)	US\$	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	
1	03 01	Kabupaten Agam	-	-	40.000,00	1.680.000,00	-	-	-	7.233.480,00	-	-	-
		Lelang kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		G. Pnus	-	-	40.000,00	1.680.000,00	-	-	-	7.233.480,00	-	-	-
2	03 02	Kabupaten Pasaman	-	-	20.000,00	1.030.500,00	-	-	-	1.008.000,00	-	-	-
		Lelang kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		G. Pnus	-	-	20.000,00	840.000,00	-	-	-	1.008.000,00	-	-	-
		Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tabu-habu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Semambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rotan Lainnya	-	-	-	190.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3	03 03	Kabupaten Limapuluh Kota	-	-	320.000,00	16.200.000,00	-	-	12.810.000,00	20.086.020,00	-	-	-
		G. Pnus	-	-	300.000,00	12.600.000,00	-	-	12.810.000,00	20.086.020,00	-	-	-
		Manau	-	-	20.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	03 04	Kabupaten Solok	-	-	72.000,00	3.024.000,00	-	-	2.620.000,00	17.596.362,00	-	-	-
		HHK Cerma Desnir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kel. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Getah Pnus	-	-	72.000,00	3.024.000,00	-	-	2.520.000,00	17.596.362,00	-	-	-
		Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03 05	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	03 06	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	140.000,00	18.840.000,00	-	-	11.911.960,00	33.786.460,00	2.626,07	37.916.916,00	-
		Hak KSU Vaina Lestari	-	-	-	-	-	-	-	3.131.000,00	2.626,07	37.916.916,00	-
		Kel. Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kel. Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lelang Kayu	-	-	-	-	-	-	-	3.020.840,00	-	-	-
		PT SJW(karat)	-	-	120.000,00	18.000.000,00	-	-	11.911.960,00	33.634.620,00	-	-	-
		G. Pnus	-	-	20.000,00	840.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tabu-Habu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	03 07	Kabupaten Tanah Datar	-	-	20.000,00	840.000,00	-	-	546.000,00	2.322.360,00	-	-	-
		G. Pnus	-	-	20.000,00	840.000,00	-	-	546.000,00	2.322.360,00	-	-	-

NO	NO KODE	KABUPATEN/KOTA	TARGETTAHUN 2019						REALISASI PSDH-DR Jan 2018 s/d Des November 2019 Tambah November-Desember 2018			
			PRCD			PSDH	DR	DR	PSDH	PSDH	DR	DR
			HHK	ACASIA	HHEK	(Rp)	US \$	Rp	(Rp)	(Rp)	US \$	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
8	03 08	Kabupaten Sijunjung	15.000,00	-	-	540.000.000,00	135.000,00	1.880.000.000,00	114.210.000,00	203.934.494,00	44.731,45	634.786.653,00
		IUPHHK-HA PT MLP	10.000,00	-	-	540.000.000,00	135.000,00	1.880.000.000,00	114.210.000,00	203.934.494,00	44.731,45	634.786.653,00
		Kel. Meranti	5.000,00	-	-	345.000.000,00	72.500,00	1.015.000.000,00	75.210.000,00	135.026.329,33	24.018,23	340.526.326,50
		Kel. Campuran	5.000,00	-	-	195.000.000,00	62.500,00	875.000.000,00	39.000.000,00	69.908.164,67	20.713,23	294.258.326,50
		KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IPK PT AIR GANING CITY	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		G. Pinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	03 09	Kabupaten Kep. Mentawai	115.000,00	-	520.000,00	7.908.000.000,00	1.859.900,00	23.238.600.000,00	7.497.812.280,00	6.801.842.883,00	1.395.439,40	19.804.237.537,00
		IUPHHK-HA PT MPL	50.000,00	-	-	3.426.000.000,00	723.400,00	10.127.600.000,00	3.681.391.500,00	3.333.406.801,50	718.659,48	10.195.275.618,50
		Kel. Meranti	49.200,00	-	-	3.394.800.000,00	713.400,00	9.987.600.000,00	3.681.391.500,00	3.333.406.801,50	718.659,48	10.195.275.618,50
		Kel. Campuran	800,00	-	-	31.200.000,00	10.000,00	140.000.000,00	-	-	-	-
		KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IUPHHK-HA PT SSS	65.000,00	-	-	4.395.000.000,00	936.500,00	13.111.000.000,00	3.716.748.480,00	3.388.763.781,50	676.779,93	9.608.961.918,50
		Kel. Meranti	62.000,00	-	-	4.278.000.000,00	899.000,00	12.596.000.000,00	3.716.748.480,00	3.388.763.781,50	676.779,93	9.608.961.918,50
		Kel. Campuran	3.000,00	-	-	117.000.000,00	37.500,00	525.000.000,00	-	-	-	-
		KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		I P H H K	-	-	520.000,00	87.000.000,00	-	-	99.672.300,00	99.672.300,00	-	-
		Manau	-	-	400.000,00	72.000.000,00	-	-	93.516.300,00	93.516.300,00	-	-
		Tabu-tabu	-	-	100.000,00	12.000.000,00	-	-	2.556.000,00	2.556.000,00	-	-
		Rolan Navii	-	-	20.000,00	3.000.000,00	-	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
10	03 10	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	03 11	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	03 12	Kota Sawahlunto	-	-	40.000,00	1.680.000,00	-	-	1.280.000,00	2.024.400,00	-	-
		G. Pinus	-	-	40.000,00	1.680.000,00	-	-	1.280.000,00	2.024.400,00	-	-
13	03 13	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	378.000,00	-	-
14	03 14	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	44.323.523,00	-	-
		IPPKH PT Serren Padang	-	-	-	-	-	-	-	38.629.550,00	-	-
		Kayu Lelang	-	-	-	-	-	-	-	5.493.973,00	-	-
15	03 15	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	8.011,33	115.151.638,00
16	03 16	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	674.820,00	-	-
17	03 17	Kabupaten Dharmasraya	-	70.000,00	-	588.000.000,00	-	-	266.946.474,00	252.664.232,00	34.542,33	488.243.811,00
		Kayu Lelang	-	-	-	-	-	-	5.380.218,00	5.380.218,00	-	-
		Hak Kelan Sungai Pauh Duo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IUPHHK-HT PT BRM	-	70.000,00	-	588.000.000,00	-	-	261.566.256,00	247.284.014,00	34.542,33	488.243.811,00
18	03 18	Kabupaten Solok Selatan	-	-	2.000,00	120.000.000,00	-	-	222.963.544,00	289.286.872,00	21.280,62	301.858.642,00
		IUPHHK-HT PT BRM	-	-	-	-	-	-	105.496.944,00	143.663.108,00	-	-
		KUD Lubuk Ulang Aling Mandiri	-	-	2.000,00	120.000.000,00	-	-	35.480.000,00	35.480.000,00	-	-
		IPK Hutun Hak	-	-	-	-	-	-	82.006.600,00	120.172.764,00	21.280,62	301.858.642,00
19	03 19	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	2.000,00	120.000.000,00	-	-	41.103.000,00	41.103.000,00	-	-
		KSU HB Tombang (walef)	-	-	2.000,00	120.000.000,00	-	-	41.103.000,00	41.103.000,00	-	-
		Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tabu-tabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H			130.000,00	70.000,00	1.176.000,00	9.319.294.500,00	1.794.900,00	25.128.600.000,00	8.172.083.248,00	7.734.273.906,00	1.506.631,20	21.392.195.197,00

Dari Tabel 21 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2019, realisasi PNPB terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 84,55% atau naik 10,87%. Realisasi nilai PNPB sektor kehutanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi nilai PSDH+DR}}{\text{Target nilai PSDH+DR}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rp } 7.734.273.906 + \text{Rp } 21.392.195.197}{\text{Rp } 9.319.294.500 + \text{Rp } 25.128.600.000} \times 100\% = 84,55\%$$

Permasalahan:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
2. Masih kurangnya partisipasi perusahaan untuk melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Masih lemahnya pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan pada areal-areal konsesi.

Solusi:

1. Melakukan peningkatan pengetahuan dan informasi melalui sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat maupun perusahaan;
2. Melakukan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di kabupaten/kota dengan meningkatkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai UPTD Dinas Kehutanan yang berlokus di Kabupaten/Kota.

II. Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan

Sasaran Strategis 2 yaitu **Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan**, diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Tujuan, Sasaran Strategis 2, dan Indikator Kinerja Utama 3

Daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari *illegal logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas \pm 2.380.057 ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015, total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 ha artinya 26,50% dari kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat yang diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Luas lahan kritis seluas 630.695 ha yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka tersebut. Sasaran “Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat” dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan. Laju kerusakan hutan diturunkan melalui berbagai upaya diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis dan menurunkan titik panas (*hotspot*).

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	12%	12,45%	103,75
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					103,75

Dari Tabel 22 di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 2 pada tahun 2019 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 103,75%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didorong oleh progresifnya Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam empat tahun terakhir dibuktikan dengan menurunnya laju kerusakan hutan dalam dua tahun terakhir sebesar 19,22% pada tahun 2018 dan 12,45% pada tahun 2019 dari laju kerusakan hutan pada tahun 2016 yang dijadikan baseline untuk penghitungan laju kerusakan hutan hingga tahun 2021.

Sasaran kinerja ini cenderung bersifat teknokratis dan metodologis mengingat indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan

tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol dalam perencanaan, sebagai contoh kebakaran hutan merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kerusakan hutan secara cepat dan tanpa dapat dikontrol dalam perencanaan karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim yang saat ini sangat ekstrim. Kebakaran hutan yang luas akan sangat mempengaruhi laju kerusakan hutan disamping variabel lainnya seperti perambahan, *illegal logging*, dan perladangan.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2018 dan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Target 2019	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
				2018 (n-1)	2018 (n)	2019 (n)	2019 (n)
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	10%	12%	19,22%	192,20	12,45%	103,75

Dari Tabel 23 di atas dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indikator Kinerja 3 yaitu persentase penurunan laju kerusakan hutan dapat direalisasikan 12,45% atau turun sebesar 6,77% dari realisasi tahun sebelumnya. Walaupun demikian jika dilihat dari target kinerja tahun 2019 daya dukung dan daya tampung hutan di Provinsi Sumatera Barat sudah optimal dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019.

Capaian kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 8.

IKU 3



Gambar 8. Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun 2017-2019.



Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017-2019.

Dari Gambar 8 dan Gambar 9 Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi kenaikan angka persentase penurunan laju kerusakan hutan dari 9,92% menjadi 19,22% namun pada capain kinerja terjadi penurunan capaian target kinerja dari 198,40% pada Tahun 2017 menjadi 192,20% pada Tahun 2018, hal terjadi dikarenakan pada Tahun 2018 target penurunan adalah 10% sehingga angka 19,22% mencapai angka capaian kinerja sebesar 192,20%, kondisi ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2017 turun sebesar 6,20%. Tahun 2019 laju kerusakan hutan turun dari 19,22% pada tahun 2018 menjadi 12,45% pada tahun 2019 hal ini disebabkan berkurangnya tutupan hutan pada tahun 2019 disebabkan pembukaan hutan menjadi perkebunan atau lahan terbuka lainnya. Namun dibandingkan angka laju kerusakan hutan tahun 2016 (base line) laju kerusakan hutan di tahun 2019 lebih rendah.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan (%)
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	15%	12,45%	83

Dari Tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” tercapai 83% dari target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan target Tahun keempat maka tingkat

kemajuan 83% melebihi target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 80%. Artinya, setiap tahun laju kerusakan kawasan hutan dapat dikendalikan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran, penanaman dan upaya preventif lainnya yang dapat memperlambat laju kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Ket
		Sumbar 2019	Sumbar 2018	KemenLH K 2018	
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	12,45%	19.22%	33,53%	Lebih Rendah

Dari Tabel 25 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja 3 yaitu “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Angka deforestasi Indonesia Tahun 2012-2019 sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Tahun	Angka Deforestasi Indonesia (Ha)
2012	610.000
2013	730.000
2014	400.000
2015	1.090.000
2016	630.000
2017	480.000
2018	440.000

Jika menggunakan metode penghitungan yang sama dengan penghitungan persentase penurunan laju kerusakan hutan Sumatera Barat dimana yang dijadikan baseline adalah rata-rata angka deforestasi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 maka penurunan laju kerusakan hutan (deforestasi) Indonesia pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan rata-rata deforestasi Indonesia dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 adalah 33,53%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penurunan laju

kerusakan hutan Sumatera Barat. Hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan upaya pemerintah pusat yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga hutan. Angka deforestasi ini didapatkan dari deforestasi bruto yang merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan berhutan menjadi kelas penutupan lahan tidak berhutan, dikurangi dengan perubahan kondisi tak berhutan menjadi berhutan (reforestasi). Perbaikan tutupan hutan dan lahan telah menyumbangkan indeks tutupan hutan dan lahan.

Laju kerusakan hutan Sumatera Barat tahun 2019 turun sebesar 6,77% dari tahun 2018. Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya, yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sijunjung. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pasaman Barat meningkat akibat meningkatnya luas perkebunan. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan meningkatnya aktivitas budidaya pertanian lahan kering. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Sijunjung disebabkan adanya perubahan penggunaan kawasan untuk areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat.

Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2019		Ket
		Sumbar	Sumut	
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	12,45%	-	-

Dari Tabel 26 terlihat bahwa dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran “Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat” tidak bisa dibandingkan karena Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan data laju kerusakan hutan.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui empat program dengan pembiayaan APBD, yaitu:

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yang terdiri atas 14 kegiatan yaitu:
 - a. Evaluasi keberhasilan penanaman N-5
 - b. Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan diluar Kawasan Hutan
 - d. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan
 - e. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

- f. Konservasi Sumber Daya Genetik
 - g. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL (DBH-DR)
 - h. Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan (DBH DR)
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTPL/RTnRL (DBH DR)
 - j. Pembuatan Sumur Resapan (DAK)
 - k. Pembuatan Gully Plug (DAK)
 - l. Pembuatan Tanaman (DAK)
 - m. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK)
 - n. Pembuatan Dam Penahan (DAK)
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas 29 kegiatan yaitu:
- a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
 - b. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Agam Raya
 - c. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
 - d. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
 - e. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai
 - f. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
 - g. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
 - h. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Sijunjung
 - i. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Solok
 - j. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
 - k. Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota
 - l. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya
 - m. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
 - n. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
 - o. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota

- p. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai
 - q. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
 - r. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
 - s. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung
 - t. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok
 - u. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
 - v. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
 - w. Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan
 - x. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
 - y. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
 - z. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - aa. Pengukuran Simpanan Karbon
 - bb. Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan (DBH-DR)
 - cc. Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH
3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan yang terdiri atas 18 Kegiatan yaitu:
- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya
 - b. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya
 - c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari
 - d. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai
 - f. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya
 - g. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan
 - h. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung
 - i. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok
 - j. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan
 - k. Supervisi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

- l. Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
- m. Sosialisasi Dan/Atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Berbagai Macam Metode
- n. Pelatihan/Pembekalan/In House Training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- o. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- p. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
- q. Monitoring Dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan
- r. Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-Lain

Seluruh kegiatan capaian kinerjanya cukup baik, namun ada beberapa kegiatan yang capaian fisiknya tidak mencapai angka 100% hal ini disebabkan karena ada kegiatan pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang bersifat situasional. Kegiatan bersifat situasional artinya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tergantung pada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kewenangan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan tersebut. Tidak optimalnya capaian kinerja kegiatan tersebut bukan berarti kesalahan dalam perencanaan tetapi merupakan keberhasilan kegiatan lainnya yang bersifat preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta semakin baiknya sarana dan prasarana dalam deteksi dini serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan pada Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang bersifat situasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan.
2. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain disebabkan oleh adanya kegiatan yang bersifat situasional, tidak optimalnya capaian kinerja fisik juga disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada Program Rehabilitasi dan dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yaitu:

1. Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan (DBH-DR), kegiatan ini terealisasi 60% disebabkan gagal tender bibit di 7 lokasi pada dua kabupaten, empat lokasi di Kabupaten Agam dan tiga lokasi di Kabupaten Pasaman.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTnRL, RPRL (DBH-DR), kegiatan ini terealisasi 0% disebabkan tidak adanya penyedia yang menyatakan berminat untuk melaksanakan penyusunan dokumen RTnRL (Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan) tahun 2020.
3. Pembuatan Tanaman (DAK), kegiatan ini terealisasi 57% disebabkan dari target 410 ha yang berhasil di tanam hanya 235 ha, tidak dilaksanakan penanaman 175 ha disebabkan gagal tender bibit pada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemeliharaan Tanaman Hutan Tahun Pertama (DAK), kegiatan ini terealisasi 89% disebabkan dari target pemeliharaan tahun pertama seluas 956 ha terealisasi hanya 856 ha, 100 ha tidak dilaksanakan dikarenakan gagal tender bibit di Kabupaten Pasaman.

Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 27.

Tabel 27. Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	1	Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan	Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan	125 Ha	125 Ha	100%	
				2	Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	10 lokasi	10 lokasi	100%	
				3	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terevaluasinya kinerja pengelolaan DAS dan tersusunya dokumen DAS	2 DAS	2 DAS	100%	
				4	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik	2 unit	2 unit	100%	
				5	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	250,000 batang	250,000 batang	100%	
				6	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	8 unit/2 buku	8 unit/2 buku	100%	
				7	Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan (DBH-DR)	Terlaksananya penanaman lahan kritis	10 KPH/ Resort	6 KPH/ Resort	60%	
				8	Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL (DBH-DR)	Tersusunya Dokumen perencanaan RPRL dan RTnRL	10 Buku	0	0%	
				9	Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan (DBH-DR)	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya sertifikasi sumber benih tanaman hutan	5.000 btg	5.000 btg	100%	
				10	Pembuatan sumur resapan (DAK)	Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan Tanah longsor	1 unit	1 unit	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				11 Pembuatan Gully Plug (DAK)	Gully plug yang terbangun	20 unit	20 unit	100%	
				12 Pembuatan Tanaman (DAK)	Terlaksananya penanaman pada hutan/ lahan	410 Ha	235 Ha	57%	
				13 Pemeliharaan tanaman hutan tahun pertama (DAK)	Terpeliharanya tanaman tahun pertama	956 Ha	856	89%	
				14 Pembuatan Dam Penahan (DAK)	Terbangunnya Dam Penahan	15 unit	15 unit	100%	
			Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1 Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	5 kasus	5 kasus	100%	
				2 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	21 kali	21 kali	100%	
				3 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph dhamasraya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Dhamasraya	9 kali	9 kali	100%	
				4 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph hulu batang hari	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	10 Kali	10 Kali	100%	
				5 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai	10 Kali	10 Kali	100%	
				6 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	18 Kali	18 Kali	100%	
				7 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	10 Kali	10 Kali	100%	
				8 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph sijunjung	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	15 kali	15 kali	100%	
				9 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph solok	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok	8 Kali	8 Kali	100%	
				10 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan	9 Kali	9 Kali	100%	
				11 Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota	10 Kali	10 Kali	100%	
				12 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	
				13 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dhamasraya	Wilayah kelola KPH Dhamasraya yang dikonservasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	
				14 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	
				15 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
				16	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	wilayah kelola KPH Mentawai yang di konservasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	
				17	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang di konservasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	
				18	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	
				19	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Wilayah kelola KPH Sijunjung yang di konservasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	
				20	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	
				21	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi	2 lokasi	2 lokasi	100%	
				22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	450 orang	450 orang	100%	
				23	Penyusunan peta laju kerusakan hutan	Peta laju kerusakan hutan	6 peta	6 peta	100%	
				24	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan Potensi Jasa lingkungan yang di fasilitasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	
				25	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya akawasan ekosistem esensial	1 unit	1 unit	100%	
				26	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	1 Lap	1 Lap	100%	
				27	Pengukuran simpanan karbon	Terseadinya data simpanan karbon	10 Petak	10 Petak	100%	
				28	Pengendalian dan pencegahan kerusakan hutan dan kawasan hutan (DBH-DR)	Patroli/operasi gabungan pengamanan hutan/TPHT	14 Kali	14 Kali	100%	
				29	Pengadaan kendaraan roda 2 untuk pengamanan KPH	Jumlah kendaraan roda 2 untuk pengamanan hutan	6 unit	6 unit	100%	
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	10 Kali	10 Kali	100%	
				2	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	17 Kali	17 Kali	100%	
				3	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	10 Kali	10 Kali	100%	
				4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	10 Kali	10 Kali	100%	
				5	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	Jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	8 Kali	8 Kali	100%	
				6	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	8 Kali	8 Kali	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				7 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	6 Kali	6 Kali	100%	
				8 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	9 Kali	9 Kali	100%	
				9 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	8 Kali	8 Kali	100%	
				10 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	12 Kali	9 Kali	75%	
				11 Supervisi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah supervisi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	4 Kali	4 Kali	100%	
				12 Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan yang tersedia	267 Unit	267 Unit	100%	
				13 Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai macam metode	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	700 Orang	600 Orang	85%	
				14 Pelatihan/ pembekalan/ in house training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	510 Orang	510 Orang	100%	
				15 Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	40 Kali	40 Kali	100%	
				16 Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	18 kali	12 Kali	67%	
				17 Monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	18 kali	10 Kali	56%	
				18 Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain	Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	46 kali	44 kali	95%	

Uraian capaian indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” memiliki target sebesar 12%, terealisasi sebesar 12,45% dengan tingkat capaian 103,75% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator kinerja tersebut di atas diukur dengan menghitung dengan formula ((laju kerusakan hutan tahun n - laju kerusakan hutan tahun 2016 (data base))/laju kerusakan hutan tahun 2016 (data base)) X 100%. Dari perubahan tutupan lahan tahun 2016 dan tahun 2019 diperoleh kerusakan hutan Sumatera Barat adalah 39.397 ha dalam 3 (tiga) tahun, yang juga berarti laju kerusakan hutan adalah setara dengan 13.132 ha/tahun atau meningkat 1.015 ha/tahun dibandingkan dengan Tahun 2017. Sesuai dengan dokumen SRAP REDD+ yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan analisis data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju kerusakan hutan tahun 2016 terhitung adalah sekitar 15.000 ha/tahun, di mana angka ini merupakan data base untuk penghitungan penurunan laju kerusakan hutan hingga tahun 2021.

Capaian Target IKU Persentase penurunan laju kerusakan hutan Tahun 2019 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti yang terdapat pada Tabel 28.

Tabel 28. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	0%	0%	0%	12%	0%	100	0%	100	0%	100	12,45%	103,75

Dari Tabel 28. di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti penanaman, patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan satuan tugas pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan rekapitulasi data tutupan lahan tahun 2017 hingga Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Tutupan Lahan Kawasan Hutan (ha) Tahun 2017 hingga Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Luas TH 2017	Deforestasi 2018	Luas TH 2018	Deforestasi 2019	Luas TH 2019
1	Kab. Agam	56.657	206	56.451	169	56.282
2	Kab. Dharmasraya	57.214	3.528	53.686	1.903	51.782
3	Kab. Lima Puluh Kota	125.100	1.048	124.052	625	123.427
4	Kab. Mentawai	464.363	913	463.450	790	462.660
5	Kab. Padang Pariaman	26.288	126	26.162	158	26.005
6	Kab. Pasaman	217.869	886	216.984	1.349	215.635
7	Kab. Pasaman Barat	75.958	637	75.321	4.361	70.959
8	Kab. Pesisir Selatan	311.659	3.020	308.639	2.276	306.362
9	Kab. Sijunjung	128.713	242	128.471	2.144	126.327
10	Kab. Solok	172.203	408	171.796	524	171.271
11	Kab. Solok Selatan	200.022	4.767	195.255	837	194.418
12	Kab. Tanah Datar	42.383	11	42.372	62	42.310
13	Kota Padang	32.794	1.069	31.725	185	31.541
14	Kota Padang Panjang	354	-	354	33	321
15	Kota Payakumbuh	198	-	198	-	198
16	Kota Sawahlunto	2.325	-	2.325	19	2.306
17	Kota Solok	949	-	949	4	945
	Luas Total	1.915.050	16.861	1.898.189	15.440	1.882.749

Sumber: Hasil penghitungan Tim Penghitung Laju Kerusakan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 29 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2019, laju kerusakan hutan sebesar 13.132 ha/tahun $((1.922.146 \text{ ha} - 1.882.749 \text{ ha})/3 \text{ tahun})$. Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sijunjung. Hal ini disebabkan di tiga kabupaten tersebut terjadi perubahan penggunaan kawasan untuk areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat. Laju penurunan kerusakan kawasan hutan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perbandingan skenario target penurunan laju kerusakan hutan dengan laju kerusakan hutan yang terjadi (ha/tahun)

Dari Gambar 10 di atas diketahui bahwa, berdasarkan perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada Tahun 2016 dan 2019, laju kerusakan hutan pada tahun 2019 adalah 13.132 ha/tahun atau mengalami penurunan dari angka 15.000 pada tahun 2016 (*base line*). Artinya pada tahun 2019, jumlah lahan kawasan hutan yang terbuka/berubah menjadi semak belukar dan areal perladangan/perkebunan berkurang dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga laju kerusakan hutan dikatakan menurun dari tahun 2016 (*base line*). Menurunnya laju kerusakan hutan pada tahun 2019 dibandingkan dengan laju kerusakan hutan tahun 2016 (*base line*) merupakan hasil positif terhadap upaya untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan ilegal dan perambahan. Hal lain yang ikut mendukung capaian indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” adalah:

- ✓ Pemulihan lahan kritis melalui kegiatan penanaman dan kegiatan pendukung lainnya. Keberhasilan penanaman yang berkontribusi dalam menurunkan lahan kritis adalah penanaman yang dilakukan pada Tahun 2014. Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5 disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5

No.	Kabupaten	Luas yang telah dievaluasi (ha)		
		Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Lima Puluh Kota	1.817	536	2.353
2.	Kabupaten Agam	785	-	785
3.	Kabupaten Pasaman	1.028	22	1.050
4.	Kabupaten Tanah Datar	1.200	-	1.200
5.	Kabupaten Pd. Pariaman	723	2	725
6.	Kabupaten Sijunjung	624	-	624
7.	Kabupaten Solok	375		375
	Jumlah	6.552	560	7.112

Dari Tabel 30 terlihat bahwa hasil penanaman pada tahun 2014 seluas 7.112 Ha dan yang termasuk kategori berhasil adalah 6.552 Ha. Artinya, hasil penanaman tahun 2014 telah memberikan sumbangan pada penambahan penutupan hutan tahun 2019 seluas 4.226 Ha. Dengan diketahui jumlah pohon yang hidup dan tumbuh baik sampai Tahun 2019, maka hasil penanaman selama lima tahun yang lalu dapat mengurangi luas lahan kritis sampai tahun 2019.

- ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hutan. Melalui Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN). Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 juga telah berhasil membentuk 157 kelompok LMPHBN yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota yang terdiri atas 450 personil satgas seperti disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2019 di Sumatera Barat

No.	Kabupaten	Jumlah Nagari	Jumlah Personil Satgas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kabupaten Agam	16	48
2	Kabupaten Padang pariaman	15	31
3	Kabupaten Solok Selatan	16	48
4	Kabupaten Sijunjung	11	33
5	Kota Sawahlunto (Wil KPHL BB)	4	12
6	Kabupaten Pasaman	14	54
7	Kabupaten Pesisir Selatan	9	27
8	Kabupaten Pesisir Selatan (Wil KPHL BB)	3	9
9	Kabupaten Pasaman Barat	11	35
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	8	24
11	Kab. Lima Puluh Kota (Wil KPHL Agam Raya)	1	3
12	Kab. Lima Puluh Kota (Wil KPHL BB)	1	3
13	Kabupaten Tanah Datar (Wil KPHL BB)	7	21
14	Kab. Solok dan Kota Solok (Wil KPHL BB)	4	12
15	Kepulauan Mentawai	-	-
16	Kota Padang	11	12
17	Kabupaten Dharmasraya	14	42
18	Kabupaten Solok	12	36
	Jumlah/Total	157	450

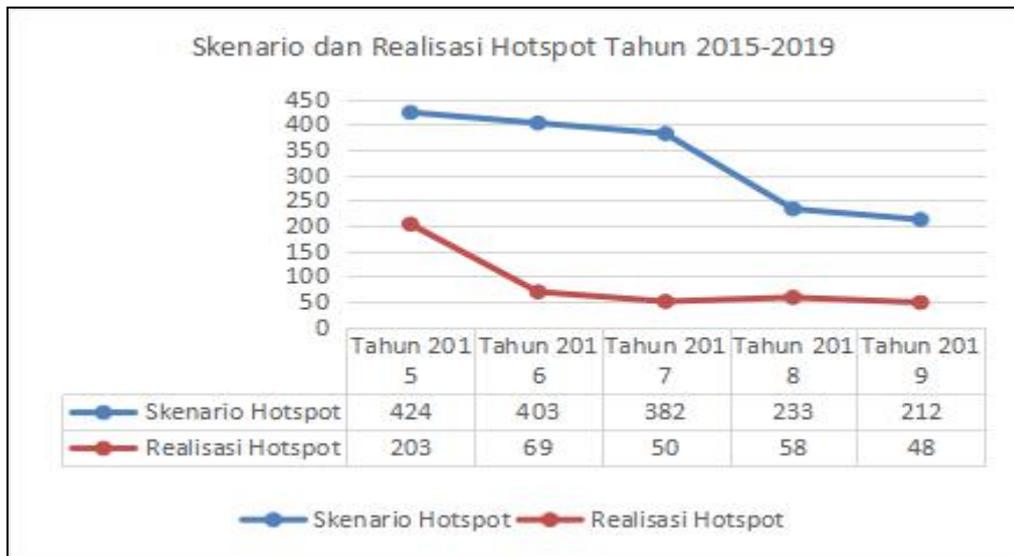
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Pada tahun 2019, anggota LMPHBN yang mendapatkan fasilitasi berupa bantuan insentif untuk penguatan kelembagaan PHBN adalah sebanyak 450 orang yang tersebar pada sembilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Disamping penyerahan bantuan insentif dan sosialisasi, kepada anggota PHBN diberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) dalam upaya perlindungan hutan sehingga dapat lebih berperan aktif mengantisipasi meningkatnya tindak pidana kehutanan bidang kehutanan dan menjaga fungsi dan keberadaan hutan secara lestari.

✓ Penurunan jumlah titik panas (*hotspot*).

Pada tahun 2019, jumlah *hotspot* yang terjadi masih rendah dari pada skenario yang ditetapkan. Keberhasilan dalam mengendalikan jumlah *hotspot* merupakan hasil dari pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Damkarhutla) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh iklim dan curah hujan juga mempengaruhi capaian indikator kinerja ini. Koordinasi yang dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota berupaya menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada.

Hasil pantauan titik api (*hotspot*) di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan sangat terpengaruh dengan kondisi musim/iklim yang erat kaitannya dengan isu pemanasan global. Skenario penurunan titik panas (*hotspot*) dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata titik panas (*hotspot*) tahun 2011-2015. Selanjutnya ditetapkan target indikator kinerja yaitu penurunan titik panas (*hotspot*)

sebanyak 5% pada tahun 2016, 10% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 target dinaikkan menjadi 45% dan 50% untuk tahun 2019 maka didapatlah angka toleransi titik panas (*hotspot*) dalam bentuk skenario seperti Gambar 11.



Gambar 11. Skenario dan Realisasi *Hotspot* Tahun 2015 – 2019

Permasalahan :

1. Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih sangat terbatas sehingga penyelesaian kasus tidak bisa ditangani secara komprehensif;
2. Instrumen penegakan hukum belum maksimal untuk menangani pelanggaran dibidang kebakaran hutan dan lahan;
3. *Hotspot* banyak terdapat di luar kawasan hutan, sementara partisipasi para pihak di daerah (kabupaten/kota) belum maksimal sampai ke tingkat nagari/desa.

Solusi:

1. Mengusulkan penambahan jumlah PPNS;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani pelanggaran dibidang kebakaran hutan dan lahan;
3. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Tujuan **Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan** dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan** merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam, terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat serta memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat. Pencapaian kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14,86%	18,01%	121,20
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					121,20

Dari Tabel 32 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 3 pada tahun 2019 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran 121,20% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 121,20% di atas adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui pola HTR, HKm, dan HN pada tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 33. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2018 dan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	Target 2019	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
				2018 (n-1)	2018 (n-1)	2019 (n)	2019 (n)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11,68%	14,86%	16,62%	142,29	18,01%	121,20

Dari Tabel 33 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” tahun 2019 terealisasi 18,01% atau meningkat 1,39% dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2018. Capaian kinerja Sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 13.

IKU 4



Gambar 13. Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (%) Tahun 2016-2019



Gambar 14. Capaian Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan (5) Tahun 2016-2019

Tabel 34. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	21,21%	18,01%	84,91

Tabel 34 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat” diatas pada tahun 2019 telah mendukung capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 78,36%. Memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian maka diperkirakan sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” pada target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan dapat dicapai.

Tabel 35. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2018 dan 2019			Ket
		Sumbar 2018	Sumbar 2019	KemenLH K 2019	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	16,62%	18,01%	4,11%	Lebih tinggi

Dari Tabel 35 dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat sekitar hutan kini merasakan kehadiran pemerintah, yaitu dengan adanya Perhutanan Sosial. Diakhir Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12,7 juta ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat di 25.863 desa yang sebagian besar kehidupannya tergantung pada hutan. Lima skema Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Kinerja Perhutanan Sosial se-Indonesia pada tahun 2019 adalah kawasan hutan yang sudah diakses oleh masyarakat seluas 4.048.376,81 ha dibandingkan dengan jumlah luas hutan lindung dan hutan produksi Indonesia sekitar 98.498.522,73 ha, maka diketahui bahwa persentase luas hutan Indonesia yang dikelola oleh masyarakat adalah 4,11%. Sumatera Barat dengan luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 1.573.129 ha dan luas hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat seluas 283.369 Ha, maka persentase luas hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Barat adalah 18,01%. Keberhasilan Sumatera Barat akan berkontribusi pada target pencapaian pada tingkat nasional.

Tabel 36. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2019		Ket
		Sumbar	Sumut	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	18,01%	2,13%	Lebih Tinggi

Dari Tabel 36 dapat dilihat, capaian indikator tersebut di atas Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, NGo dan akademisi. Dari luas hutan lindung dan hutan produksi Provinsi Sumatera Utara seluas 2.628.786 ha, luas hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Utara seluas 55.974,68 ha terdiri dari Hutan Tanaman Rakyat 16.163,61 ha, Hutan Desa 4.058 ha, Hutan Kemasyarakatan 30.173,29 ha dan kemitraan kehutanan 5.579,78 ha sedangkan Provinsi Sumatera Barat dari luas hutan lindung dan hutan produksi 1.573.129 ha hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Barat adalah 283.369 ha.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN. Program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD) yang terdiri atas 34 kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan
 - b. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya
 - c. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya
 - d. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari
 - e. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota
 - f. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
 - g. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung
 - h. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok
 - i. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
 - j. Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat
 - k. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya

- l. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Pasaman Raya
- m. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Sijunjung
- n. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya
- o. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari
- p. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Lima Puluh Kota
- q. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan
- r. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Solok
- s. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan
- t. Supervisi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan
- u. Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya
- v. Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
- w. Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya
- x. Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan
- y. Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
- z. Supervisi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hutan Mangrove
- aa. Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan

- ab. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan
 - ac. Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan
 - ad. Penyiapan Perhutanan Sosial (DBH-DR)
 - ae. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (DBH-DR)
 - af. Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan (DBH-DR)
 - ag. Pemberdayaan KTH melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH-DR)
 - ah. Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBH-DR)
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 sub komponen yaitu:
- a. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
 - b. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 37.

Tabel 37. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Pemantapan kawasan hutan	1. Pemeliharaan batas kawasan hutan	Terpeliharanya Batas Kawasan Hutan	70 Km	70 Km	100%	
				2. Pengendalian perencanaan dan tata hutan	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	1 Buku	1 Buku	100%	
				3. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Agam Raya	3 unit	3 unit	75.00%	
				4. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 unit	2 unit	100%	
				5. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	2 unit	2 unit	100%	
				6. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Lima puluh kota	2 unit	2 unit	100%	
				7. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Mentawai	2 unit	2 unit	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				8	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Solok	1 unit	1 unit	100%	
				9	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	1 unit	1 unit	100%	
				10	Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Jumlah pengelola perhutanan sosial yang mengikuti forum	110 Orang	110 Orang	100%	
				11	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	
				12	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	
				13	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Sijunjung	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	
				14	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	2 Kelompok	2 Kelompok	100%	
				15	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	
				16	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	
				17	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	2 Kelompok	2 Kelompok	100%	
				18	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	2 Kelompok	2 Kelompok	100%	
				19	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	4 Kelompok	4 Kelompok	100%	
				20	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	100%	
				21	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	1 Kali	1 Kali	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				22	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	2 kali	2 kali	100%	
				23	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	1 Kali	1 Kali	100%	
				24	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	1 Kali	1 Kali	100%	
				25	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	1 Kali	1 Kali	100%	
				26	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove	5 Kali	5 Kali	100%	
				27	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah supervisi, bimtek dan pembinaan kegiatan penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	20 Kali	20 Kali	100%	
				28	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah SDM pengelola Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	180 orang	180 orang	100%	
				29	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	5 Kelompok	5 Kelompok	100%	
				30	Penyiapan perhutanan sosial (DBH-DR)	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelompok/lembaga masyarakat dalam pengurusan dan pengelolaan HN, HKm, HTR, HA dan HR kemitraan	20 kelp	20 kelp	100%	
				31	Pengembangan usaha perhutanan sosial (DBH-DR)	Jumlah pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha dan Jumlah alat ekonomi produktif untuk mengembangkan usaha yang bernilai	50 orang dan 2 unit	50 orang dan 2 unit	100%	
				32	Metode dan materi penyuluhan kehutanan (DBH-DR)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis - Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha KTH - Jumlah pemenang wana lestari untuk tahun 2019 tingkat Sumatera Barat	160 org, 90 org, 15 org.	160 org, 90 org, 15 org.	100%	
				33	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha (DBH-DR)	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya	10 KTH	10 KTH	100%	
				34	Pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan (DBH-DR)	Jumlah penyuluh kehutanan yang melaksanakan identifikasi areal RHL, survey sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL dan sosialisasi kebijakan RHL oleh penyuluh kehutanan - Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti PCD identifikasi areal RHL	60 org, dan 60 org	60 org, dan 60 org	100%	

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” memiliki target sebesar 14,86%, terealisasi sebesar 18,01% dengan tingkat capaian 121,20% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator Kinerja

Utama “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” dihitung dengan formula luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Sumatera Barat dikalikan angka 100%.

Capaian Target IKU “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” tahun 2019 setiap triwulannya dapat diuraikan pada Tabel 38.

Tabel 38. Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat Per Triwulan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	Capaian n%	TRW II	Capaian %	TRW III	Capaian n%	TRW IV	Capaian %
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat	5%	10%	11,68%	14,86%	15,51	310,20	15,51	155,10	16,68	142,81	18,01	121,20

Dari Tabel 38 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat/Kemitraan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat, dan melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kelembagaan, Pengendalian PHBM.

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses perizinan mulai dari usulan, proses verifikasi, penetapan areal kerja, dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Izin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial, yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat di luar Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39 Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

No	SKEMA	PROGRES								Total
		Usulan		Verifikasi		PAK*		HPHD/ IUPH		
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
1	Hutan Nagari	27	14.430	5	14.223	0	0	93	178.320	125 206.973
2	Hutan Kemasyarakatan	9	5.950	5	3.913	4	2.814	42	28.418	60 41.095
3	Hutan Tanaman Rakyat	0	0	2	800	0	0	4	6.935	6 7.735
4	Kemitraan Kehutanan	1	201	4	637	0	0	0	0	5 838
5	Hutan Adat**	14	19.898	4	6.795	0	0	1	35	19 26.728
	TOTAL ***	51	40.479	20	26.368	4	2.814	140	213.708	215 283.369

Catatan:

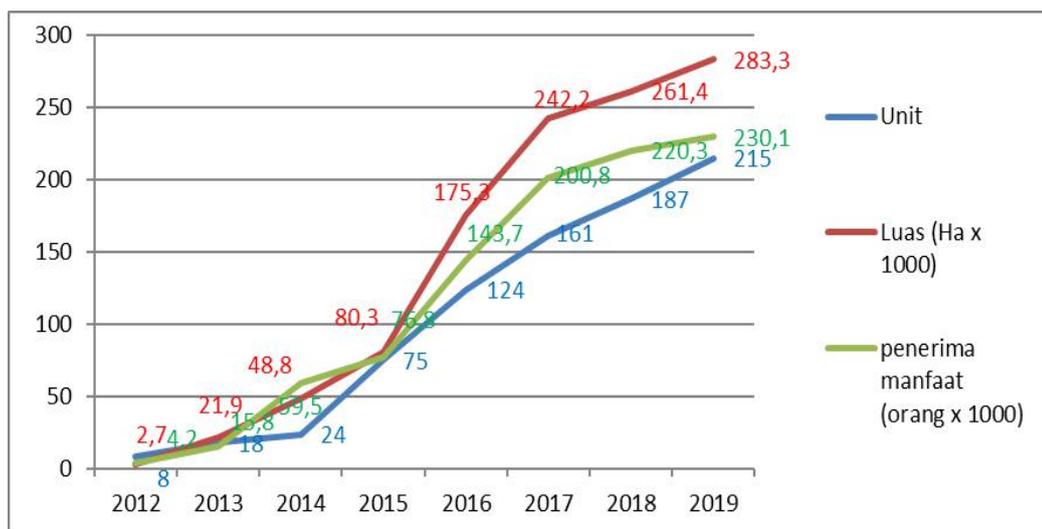
* PAK (Penetapan Areal Kerja) terhitung awal 2017 sudah tidak ada lagi.

**HA= Hutan adat

***Rincian Unit, luas dan lokasi Perhutanan Sosial secara keseluruhan

Sumber data: data olahan Bidang PPMHA

Dari Tabel 39 di atas terlihat bahwa merunut progresnya dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 15.



Gambar 15. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Delapan Tahun Terakhir

Dari Gambar 15 di atas menggambarkan perkembangan Perhutanan Sosial di seluruh tahapan proses baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir, perkembangan menggembarakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat. Dua komponen ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada. Peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan luas areal kelola dan penerima manfaat, mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya, disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR. Peningkatan perkembangan yang nyata di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di tahun 2019 adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan Perhutanan Sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, *workshop* fasilitasi usulan, rapat koordinasi Pokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping Perhutanan Sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan Sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekologis, studi primer di beberapa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari menunjukkan bahwa setelah mendapatkan perijinan Perhutanan Sosial, kepedulian masyarakat setempat akan kelestarian hutan jauh lebih meningkat, pemahaman akan pentingnya hutan bagi penyediaan air dan pencegahan bencana longsor dan banjir juga berkembang dimasyarakat luas, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penanaman pohon baik kayu kayuan terlebih lagi pohon buah buahan (MPTS). Hal ini bisa dilihat dari permintaan bibit tanaman dari lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang cenderung meningkat tiap tahunnya berdasarkan laporan UPTD BSPTH dan UPT BPDAS.

Secara sosial, di nagari yang mengembangkan perhutanan sosial juga berlangsung proses penyepakatan dan konsolidasi sosial sehingga menghasilkan kepastian pengelolaan terhadap tanah (hutan) yang dapat meminimalisir konflik tenurial dan mempererat hubungan sesama anggota masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan sosial.

Dampak dan manfaat lain yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, terutama dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dapat diilustrasikan dari studi kasus primer secara langsung melalui wawancara dengan pengelola di beberapa Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Studi pendapatan dari usaha ekowisata LPHN Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, semenjak usaha ekowisata Rumah Pohon Puncak Kayu Manang dan Air Terjun Sarasah Kua dibuka, rata rata kunjungan wisata perbulan kurang lebih 1.050 orang dengan rincian pengunjung hari kerja kurang lebih 50 orang dan hari libur sabtu/minggu antara 100 sampai dengan 300 orang, dengan membayar retribusi Rp. 5.000,- per orang dan jasa pemandu Rp. 30.000,- per kelompok (2 sampai 8 orang) sekali trip perjalanan maka LPHN telah mendapatkan penghasilan antara Rp. 9.000.000,- sampai dengan Rp. 13.200.000,- perbulannya. Nilai ini belum dihitung dari penjualan cenderamata gelang rasam, konsumsi, minuman, dan makanan yang dijual oleh masyarakat. Bila ada paket wisata menginap akan lebih tinggi lagi pendapatan masyarakat Sungai Buluh.
2. Studi pendapatan di unit usaha ekowisata kepala banda dan taman pinus wakanda LPHN Taram Kabupaten 50 Kota menunjukkan bahwa pendapatan dari penerimaan restribusi parkir dan tempat wisata dalam kurun waktu 3 bulan (September, Oktober, November 2019) telah mampu mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau rata rata Rp. 20.000.000 per bulan, bahkan dalam waktu libur akhir pekan/liburan pengunjung bisa mencapai 3.000 orang seharusnya. Belum lagi pendapatan yang diperoleh masyarakat setempat dari penjualan makanan, minuman, produk sereh wangi, jamur tiram dan cendera mata.
3. Studi pendapatan usaha penyewaan kapal boat dan penyediaan listrik melalui pembangkit listrik mikro hidro di Hkm Patamuan, berdasarkan hitungan kasar ketua kelompok Hkm penghematan dari belanja BBM untuk penerangan per hari per KK yang telah dialiri listrik antara 2½ hingga 6 liter perminggu tergantung jenis lampu yang di pakai bila rata rata 3 liter x 48 KK yang teraliri perminggu menghabiskan 144 liter per minggu atau 576 liter per bulan bila harga BBM di patamuan berkisar

Rp. 15.000 maka per bulan telah dihemat belanja Rp. 8.640.000, ditambah usaha penyewaan boat rata rata 2 trip per hari x Rp. 800,000 s/d 1.000.000, maka dalam satu bulan kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 48.000.000 s/d Rp. 60.000.000, bila dikurangi biaya operasional per tripnya 600.000 maka kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 6.000.000 hingga Rp. 12.000.000 per bulan.

4. Studi Pendapatan Usaha gula Aren di HKm Karya Setia berdasarkan pengakuan ketua kelompok (Desrawardi) Kelompok mendapat tambahan pendapatan dari proses gula semut kurang lebih antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 8.000.000, perbulan setelah dikurangi biaya produksi.
5. Studi Pengembangan Ternak Sapi/Kerbau di Hutan Nagari Pekan Rabaa, Pasir Talang Timur, Paru dan Hutan Kemasyarakatan Pasir Laweh secara sederhana telah menghasilkan pupuk organik dan tambahan jumlah ternak antara 3 s/d 4 ekor pertahun dengan rata rata hasil antara Rp. 20.000.000 s/d Rp. 35.000.000 pertahun disamping pemanfaatan kompos dan pupuk aorganik dari kotoran ternak.

Dampak peningkatan pendapatan tersebut di atas merupakan bagian kecil dari manfaat yang diterima oleh lembaga/kelompok disamping manfaat lain yang jauh lebih besar, usaha usaha lain seperti agroforestri, peternakan sapi, beras organik, kemiri, kerajinan, makanan, air mineral dll yang belum dapat kesempatan untuk diukur peningkatan pendapatannya merupakan tambahan manfaat yang patut diperhitungkan.

Mengingat dampak dan manfaat yang besar maka perlu jaminan bahwa pelayanan perijinan perhutanan sosial perlu kejelasan dan kepastian tata waktu yang bisa dilaksanakan dalam sebuah standart operasional pelayanan (SOP), untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan sesuai aturan dan berkembang sesuai dinamika kebutuhan pelayanan proses maka penting untuk terus mengimplementasikan subtransi ISO dalam pelayanan fasilitasnya.

Keberhasilan Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 telah menghantarkan Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan/Apresiasi Tokoh Perhutanan Sosial (Tokoh Hutsos) tahun 2019, sebanyak 4 Kategori dari sembilan kategori yang ada, yakni:

1. Prof Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat sebagai Tokoh Hutsos kategori Kebijakan
2. Elimarni S.Sos, Penyuluh Kehutanan Sumatera Barat untuk kategori Pendamping Tapak
3. Zofrawandi Ketua HKm Indudur untuk kategori Pengelola HKm (PS)

4. Hardedi Ketua LPHN Taram untuk kategori Pengelola Hutan Nagari (PS)



Gambar 16. Penyerahan Penghargaan/Apresiasi Tokoh Hutsos Tahun 2019

Permasalahan:

1. Belum adanya peningkatan sumber daya yang memadai terkait pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.
2. Belum efektifnya internalisasi Perhutanan Sosial di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Belum efektifnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) belum optimal.
4. Belum sepenuhnya diimplementasikan regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dan menjadi payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial yang menjadi landasan keberpihakan kepada akses kelola sumberdaya alam terutama hutan oleh masyarakat secara luas.

Solusi:

1. Memastikan peningkatan unit kerja, sarana, dan sumber daya manusia serta pembiayaan yang memadai untuk menjamin perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat dapat berkesinambungan.

2. Melaksanakan internalisasi Perhutanan Sosial kedalam seluruh Unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat bersinergi dalam mendorong percepatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
3. Penting untuk penguatan lembaga/kelompok Perhutanan Sosial agar dapat beroperasi dan memiliki unit usaha yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) mutlak terus di dorong dan diperluas.
4. Perlu segera diimplementasikan regulasi/kebijakan dan aturan khusus Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dan menjadi payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial yang menjadi landasaan keberpihakan kepada akses kelola sumberdaya alam terutama hutan oleh masyarakat secara luas.

IV. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan “**Meningkatnya Kinerja Organisasi**” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Tujuan dan Sasaran Strategis 4.

Tujuan “**Meningkatnya Kinerja Organisasi**” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (79)	A (80,66)	102,10
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					102,10

Dari Tabel 40 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada tahun 2019 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 102,10% atau naik 2,43% dari rata-rata capaian tahun lalu dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 102,10% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang efektif karena masih dalam kategori sangat baik.

Tabel 41. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Target 2019	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
				2018 (n-1)	2018 (n-1)	2019 (n)	2019 (n)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	100%	A	102,10

Dari Tabel 41 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” tahun 2019 lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018, yaitu A. Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 18 dan 19.

IKU 5



Gambar 18. Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2018

IKU 5



Gambar 19. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Tabel 42. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	A	102,10

Tabel 42 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” pada tahun 2018 telah melebihi capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 102,10%. Namun, capaian ini tidak berarti capaian akhir RPJMD dan atau Renstra telah tercapai dengan terealisirnya tingkat kemajuan terhadap capaian akhir RPJMD dan atau Renstra sebesar 100%. Karena capaian akhir RPJMD dan atau Renstra akan tercapai, jika hingga tahun 2021, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat minimal BB setiap tahunnya.

Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2018		Ket
		Sumbar	Sumut	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A (80,66)	C (47,38)	Lebih tinggi

Dari Tabel 43 dapat dilihat bahwa capaian indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja A artinya kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sudah memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Sedangkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai C, artinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara masih kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan dan perbaikan yang mendasar.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui delapan program yang terdiri atas tujuh program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) yang terdiri atas 13 kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi
 - l. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
 - m. Penyediaan Jasa Gedung Kantor/ Rumah Dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas 8 kegiatan yaitu:
- a. Pengadaan Mubelair
 - b. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
 - g. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri atas 1 kegiatan yaitu:
- a. Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri atas 5 kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Penatausahaan Keuangan SKPD
 - d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
 - e. Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri atas 3 kegiatan yaitu:
- a. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

- b. Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP
 - c. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Program, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Komponen Administrasi Kegiatan.

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 44.

Tabel 44. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4 Tahun 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Pelayanan administrasi perkantoran	1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan		2 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				4 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang	11 unit	11 unit	100%	
				6 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik, dan telekomunikasi OPD terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				8 Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/rapat yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang diikuti	12 Bulan	12 Bulan	100%	
				13 Penyediaan jasa gedung kantor/ rumah dinas	Gedung kantor dinas yang tersewa	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor dinas Kehutanan dan UPTD Dinas Kehutanan yang terpelihara	3 unit	3 unit	100%	
				2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	100%	

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	37 unit	37 unit	100%	
				4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	287 unit	287 unit	100%	
				5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	2 unit	2 unit	100%	
				6	Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi	5 unit	5 unit	100%	
				7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	40 unit	40 unit	100%	
				8	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor	3 Unit	3 Unit	100%	
			Peningkatan disiplin aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	573 orang	573 orang	100%	
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	6 Kali	6 Kali	100%	
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan keuangan, LAKIE, LPPD, LKPJ dan Lapoan Tahunan yang tersusun	5 dok	5 dok	100%	
		2		Penatausahaan keuangan OPD	Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	100%		
		3		Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	6 dok	6 dok	100%		
		4		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelolaan aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 bulan	12 bulan	100%		
		5		Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan	10 UPTD KPH	10 UPTD KPH	100%		
			Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	Pengembangan data dan informasi kehutanan	Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	2 Laporan	2 Laporan	100%	
		2		Penyusunan neraca sumber daya hutan	Tersedianya data neraca sumber daya hutan	1 Buku	1 Buku	100%		
		3		Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Laporan	2 Laporan	100%		

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target BB, terealisasi A dengan tingkat capaian 102,10% termasuk kategori memuaskan. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset seperti terlihat pada Tabel 44 di atas.

Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018. Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakatsekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr-2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2017. SOP AP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, professional, dan bermoral.

7. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
8. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.
9. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
10. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kinerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kinerjanya kurang baik

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan. Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya sebagaimana yang telah kami lakukan melalui website www.sumbarprov.go.id.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Target IKU “Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 45.

Tabel 45. Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas	0%	BB	BB	BB	0%	100	A	102,10%	A	02,10%	A	102,10%

Dari Tabel 45 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tata kelola organisasi dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” A, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan implementasi ISO 9001:2015, melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan melaksanakan kegiatan sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 46. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Enam Tahun Terakhir

Tahun	Perencanaan Kinerja (35%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2013	25,07	14,94	10,88	5,67	18,33	74,88	BB
2014	28,64	15,89	11,47	5,83	11,67	73,5	BB
2015	25,88	17,5	11,32	5,81	13,08	73,59	BB
2016	27,64	16,49	12,68	6,27	14,5	77,58	BB
2017	28,54	18,75	12,23	6,07	13,27	78,86	BB
2018	28,54	19,41	13,21	7,84	11,66	80,66	A

Dari Tabel 46 di atas terlihat, sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai BB dan nilai A pada tahun 2018 pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara patuh. Dalam enam tahun terakhir capaian nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (*human error*). Dengan tata kelola organisasi yang baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk capaian sasaran strategis 4 tidak ditemukan masalah.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 sebagaimana Tabel 47.

Tabel 47. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Pemantapan kawasan hutan	1. Pemeliharaan batas kawasan hutan	Terpeliharanya Batas Kawasan Hutan	214,200,000	202,948,700	94.75	11,251,300
				2. Pengendalian perencanaan dan tata hutan	Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	134,371,000	115,838,200	86.21	18,532,800
				3. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Agam Raya	8,280,000	5,130,250	61.96	3,149,750
				4. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	11,280,000	10,921,700	96.82	358,300
				5. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	9,720,000	8,868,000	91.23	852,000
				6. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Lima puluh kota	4,620,000	3,321,650	71.90	1,298,350
				7. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Mentawai	23,900,000	18,320,000	76.65	5,580,000
				8. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	14,600,000	13,676,550	93.68	923,450
				9. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	7,380,000	7,117,400	96.44	262,600
				10. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Sijunjung	7,010,000	5,833,250	83.21	1,176,750
				11. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Solok	12,100,000	10,659,350	88.09	1,440,650

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				12	Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	26,090,000	24,641,875	94.45	1,448,125
				13	Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah supervisi pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	177,440,000	175,262,011	98.77	2,177,989
				14	Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	56,775,000	53,269,650	93.83	3,505,350
		b. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	1	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	50,880,000	47,482,800	93.32	3,397,200
				2	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Mentawai	52,925,000	50,753,000	95.90	2,172,000
				3	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	21,080,000	20,136,600	95.52	943,400
				4	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	10,480,000	9,680,400	92.37	799,600
				5	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	8,010,000	6,355,550	79.35	1,654,450
				6	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (UIPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Solok	6,960,000	6,745,550	96.92	214,450

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				7	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	13,680,000	12,100,750	88.46	1,579,250
				8	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan insustri kehutanan	310,000,000	285,006,061	91.94	24,993,939
				9	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan termanfaatkan	88,000,000	67,042,900	76.19	20,957,100
				10	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan termanfaatkan	41,180,000	35,350,200	85.84	5,829,800
				11	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan termanfaatkan	61,594,000	49,376,612	80.16	12,217,388
				12	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan termanfaatkan	60,112,000	55,388,953	92.14	4,723,047
				13	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan termanfaatkan	57,200,000	48,646,000	85.05	8,554,000
				14	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah petak pada wilayah KPH Limapuluh Kota terencana dan termanfaatkan	47,040,000	40,420,500	85.93	6,619,500
				15	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan	84,935,950	83,251,850	98.02	1,684,100
				16	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan termanfaatkan	122,008,000	116,955,032	95.86	5,052,968
				17	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Solok	Jumlah petak pada wilayah KPH Solok terencana dan termanfaatkan	48,668,000	46,028,800	94.58	2,639,200
				18	Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan termanfaatkan	144,120,000	139,686,474	96.92	4,433,526

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				19	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	64,260,000	48,673,495	75.74	15,586,505
				20	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Dharmasraya yang terkelola	48,788,200	47,702,213	97.77	1,085,987
				21	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang terkelola	67,360,000	60,997,500	90.55	6,362,500
				22	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang terkelola	59,280,000	48,029,800	81.02	11,250,200
				23	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Mentawai yang terkelola	51,700,000	51,487,500	99.59	212,500
				24	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	50,338,000	43,790,100	86.99	6,547,900
				25	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang terkelola	23,400,000	22,018,600	94.10	1,381,400
				26	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Jumlah Potensi Hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	56,950,000	53,543,400	94.02	3,406,600
				27	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Solok	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Solok yang terkelola	52,768,000	51,321,250	97.26	1,446,750
				28	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang terkelola	108,160,000	103,399,175	95.60	4,760,825
				29	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah kemitraan yang difasilitasi	157,089,400	140,179,500	89.24	16,909,900
				30	Pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan - alat ekonomi produksi (DAK)	Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks gini	1,143,420,000	1,107,076,910	96.82	36,343,090
				31	Pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH- Wisata (DAK)	Operasional KPH untuk peningkatan PAD melalui wisata	4,866,642,400	1,196,693,504	24.59	3,669,948,896
				32	Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor Kehutanan	200,000,000	191,541,624	95.77	8,458,376

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
Sasaran Strategis I						8,886,794,950	4,942,671,189	55.62	3,944,123,761	
2.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	a. Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	1	Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan	Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan	2,449,109,200	2,231,298,000	91.11	217,811,200
				2	Evaluasi keberhasilan Penanaman N-5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	219,110,000	199,799,400	91.19	19,310,600
				3	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Terevaluasinya kinerja pengelolaan DAS dan tersusunya dokumen DAS	395,240,000	371,893,670	94.09	23,346,330
				4	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terbangun/terpeliharanya sumber daya genetik	131,160,000	129,290,550	98.57	1,869,450
				5	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang berkualitas	377,220,000	372,830,080	98.84	4,389,920
				6	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	106,290,000	100,985,210	95.01	5,304,790
				7	Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan (DBH-DR)	Terlaksananya penanaman lahan kritis	5,662,223,800	3,329,597,700	58.80	2,332,626,100
				8	Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL (DBH-DR)	Tersusunya Dokumen perencanaan RPRL dan RTnRL	222,660,000	-	-	222,660,000
				9	Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan (DBH-DR)	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya sertifikasi sumber benih tanaman hutan	600,000,000	504,657,200	84.11	95,342,800
				10	Pembuatan sumur resapan (DAK)	Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan Tanah longsor	12,208,000	11,558,000	94.68	650,000
				11	Pembuatan Gully Plug (DAK)	Gully plug yang terbangun	160,000,000	153,946,000	96.22	6,054,000
				12	Pembuatan Tanaman (DAK)	Terlaksananya penanaman pada hutan/ lahan	4,058,099,450	1,899,129,250	46.80	2,158,970,200
				13	Pemeliharaan tanaman hutan tahun pertama (DAK)	Terpeliharanya tanaman tahun pertama	1,985,707,600	1,761,066,850	88.69	224,640,750
				14	Pembuatan Dam Penahan (DAK)	Terbangunnya Dam Penahan	1	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	513,620,000
2	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph agam raya	Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	77,870,000				63,542,500	81.60	14,327,500	

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				3	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph dhamasraya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Dhamasraya	42,110,000	41,796,140	99.25	313,860
				4	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph hulu batang hari	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	33,255,000	32,393,672	97.41	861,328
				5	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph mentawai	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai	95,050,000	84,988,000	89.41	10,062,000
				6	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pasaman raya	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	108,100,000	95,248,080	88.11	12,851,920
				7	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph pesisir selatan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Pasisir Selatan	46,340,000	46,029,300	99.33	310,700
				8	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph sijnjung	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH sijnjung	38,940,000	37,627,760	96.63	1,312,240
				9	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola kph solok	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Solok	35,750,000	29,710,650	83.11	6,039,350
				10	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Bukit barisan	73,810,000	70,287,100	95.23	3,522,900
				11	Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola limapuluh kota	Jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Lima puluh Kota	72,090,000	59,790,200	82.94	12,299,800
				12	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	43,120,000	35,024,300	81.23	8,095,700
				13	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dhamasraya	Wilayah kelola KPH Dhamasraya yang dikonservasi	28,392,000	27,444,200	96.66	947,800
				14	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari yang di konservasi	41,360,000	41,021,550	99.18	338,450

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				15	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang di konservasi	31,440,000	31,289,650	99.52	150,350
				16	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonservasi	42,450,000	31,994,000	75.37	10,456,000
				17	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi	40,480,000	39,182,250	96.79	1,297,750
				18	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan yang di konservasi	15,780,000	15,631,600	99.06	148,400
				19	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi	38,740,000	37,645,900	97.18	1,094,100
				20	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Wilayah kelola KPH Solok yang di konservasi	34,950,000	34,197,570	97.85	752,430
				21	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang di konservasi	147,400,000	133,153,679	90.33	14,246,321
				22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1,221,140,000	1,102,192,900	90.26	118,947,100
				23	Penyusunan peta laju kerusakan hutan	Peta laju kerusakan hutan	117,800,000	108,003,900	91.68	9,796,100
				24	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan Potensi Jasa lingkungan yang di fasilitasi	133,300,000	128,290,069	96.24	5,009,931
				25	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	102,692,000	88,284,900	85.97	14,407,100
				26	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	110,440,000	96,456,150	87.34	13,983,850
				27	Pengukuran simpanan karbon	Tersedianya data simpanan karbon	247,050,000	221,759,900	89.76	25,290,100
				28	Pengendalian dan pencegahan kerusakan hutan dan kawasan hutan (DBH-DR)	Patroli/operasi gabungan pengamanan hutan/TPHT	800,000,000	746,983,870	93.37	53,016,130
				29	Pengadaan kendaraan roda 2 untuk pengamanan KPH	Jumlah kendaraan roda 2 untuk pengamanan hutan	209,292,000	186,602,650	89.16	22,689,350
			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Agam Raya	38,400,000	26,553,550	69.15	11,846,450

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
				2 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dhamasraya	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Dhamasraya	43,718,000	42,207,385	96.54	1,510,615
				3 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	32,870,000	32,779,800	99.73	90,200
				4 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Limapuluh Kota	45,020,000	31,824,700	70.69	13,195,300
				5 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	Jumlah patroli, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Mentawai	29,000,000	27,516,000	94.88	1,484,000
				6 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pasaman Raya	37,600,000	29,302,600	77.93	8,297,400
				7 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Pesisir Selatan	33,910,000	33,825,200	99.75	84,800
				8 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Sijunjung	36,420,000	35,368,650	97.11	1,051,350
				9 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Solok	34,880,000	30,868,800	88.50	4,011,200
				10 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diwilayah kelola KPH Bukit Barisan	89,245,000	56,789,100	63.63	32,455,900
				11 Supervisi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah supervisi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	27,192,500	26,071,400	95.88	1,121,100
				12 Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan yang tersedia	5,837,070,000	5,680,820,100	97.32	156,249,900

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
				13 Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai macam metode	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	636,757,500	460,246,584	72.28	176,510,916
				14 Pelatihan/ pembekalan/ in house training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	609,387,000	465,514,550	76.39	143,872,450
				15 Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1,255,160,000	1,101,822,500	87.78	153,337,500
				16 Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	386,974,000	153,243,750	39.60	233,730,250
				17 Monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	314,690,000	152,995,750	48.62	161,694,250
				18 Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain	Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	454,649,200	305,515,655	67.20	149,133,545
Sasaran Strategis II						31,600,512,250	24,527,554,999	77.62	7,072,957,251
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	1 Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkat kapasitas SDM	191,680,000	187,965,022	98.06	3,714,978
				2 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	43,980,000	41,430,500	94.20	2,549,500
				3 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	50,000,000	49,508,650	99.02	491,350
				4 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	50,000,000	50,000,000	100.00	-

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				5	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	50,000,000	49,357,610	98.72	642,390
				6	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	42,760,000	41,851,700	97.88	908,300
				7	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	50,000,000	48,247,250	96.49	1,752,750
				8	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Solok	50,000,000	49,225,000	98.45	775,000
				9	Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	50,000,000	49,414,200	98.83	585,800
				10	Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Jumlah pengelola perhutanan sosial yang mengikuti forum	174,900,000	174,900,000	100.00	-
				11	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan Pada KPH Agam Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Agam Raya	37,115,000	33,434,650	90.08	3,680,350
				12	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada KPH Pasaman Raya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	40,720,000	38,668,700	94.96	2,051,300
				13	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah	49,660,000	44,166,904	88.94	5,493,096

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				14	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Dharmasraya	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Dharmasraya	31,580,000	29,426,954	93.18	2,153,046
				15	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batanghari	29,134,500	28,965,900	99.42	168,600
				16	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	46,900,000	43,810,937	93.41	3,089,063
				17	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	26,880,000	26,258,150	97.69	621,850
				18	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Solok	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Solok	22,040,000	21,876,100	99.26	163,900

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				19	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan	Jumlah kelompok atau lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	63,040,000	56,934,720	90.32	6,105,280
				20	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan	22,800,000	19,270,500	84.52	3,529,500
				21	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	18,790,000	13,490,600	71.80	5,299,400
				22	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	25,900,000	20,670,000	79.81	5,230,000
				23	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	13,160,000	12,758,300	96.95	401,700
				24	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	20,060,000	19,897,100	99.19	162,900
				25	Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	16,340,000	13,713,200	83.92	2,626,800
				26	Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	Jumlah supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove	17,320,000	13,563,500	78.31	3,756,500

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	
				27	Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah supervisi, Bimtek dan Pembinaan kegiatan penyiapan, pembinaan dan pengembangan HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	79,060,000	75,181,900	95.09	3,878,100
				28	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Jumlah SDM pengelola Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	355,320,000	342,221,000	96.31	13,099,000
				29	Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya	86,820,000	76,751,600	88.40	10,068,400
				30	Penyiapan perhutanan sosial (DBH-DR)	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelompok/lembaga masyarakat dalam pengusulan dan pengelolaan HN, HKm, HTR, HA dan HR kemitraan	660,000,000	630,830,700	95.58	29,169,300
				31	Pengembangan usaha perhutanan sosial (DBH-DR)	Jumlah pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha dan Jumlah alat ekonomi produktif untuk mengembangkan usaha yang tersedia	688,652,200	606,328,904	88.05	82,323,296
				32	Metode dan materi penyuluhan kehutanan (DBH-DR)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis - Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha KTH - Jumlah pemenang wana lestari untuk tahun 2019 tingkat Sumatera Barat	715,000,000	669,357,800	93.62	45,642,200
				33	Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha (DBH-DR)	Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya	549,000,000	530,800,240	96.68	18,199,760

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN	
				34	Pendampingan kegiatan RHL oleh penyuluh kehutanan (DBH-DR)	Jumlah penyuluh kehutanan yang melaksanakan identifikasi areal RHL, survey sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL dan sosialisasi kebijakan RHL oleh penyuluh kehutanan - Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti FGD identifikasi areal RHL	255,365,300	242,989,950	95.15	12,375,350
Sasaran Strategis 3						4,623,977,000	4,353,268,241	94.15	270,708,759	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Pelayanan administrasi perkantoran	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	155,000,000	154,719,950	99.82	280,050
				2	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	33,000,000	24,681,000	74.79	8,319,000
				3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	100,000,000	99,978,300	99.98	21,700
				4	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	5,000,000	3,000,000	60.00	2,000,000
				5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	120,940,000	119,748,013	99.01	1,191,987
				6	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	1,521,587,164	1,472,779,641	96.79	48,807,523
				7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik, dan telekomunikasi OPD terpenuhi	708,650,000	523,924,412	73.93	184,725,588
				8	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam kantor	137,650,000	131,650,000	95.64	6,000,000
				9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	80,000,000	74,472,480	93.09	5,527,520
				10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	110,000,000	109,975,500	99.98	24,500
				11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pertemuan/rapat yang diselenggarakan	20,000,000	16,562,000	82.81	3,438,000
				12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang diikuti	507,352,400	431,661,718	85.08	75,690,682
				13	Penyediaan jasa gedung kantor/ rumah dinas	Gedung kantor dinas yang tersewa	40,000,000	40,000,000	100.00	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor dinas Kehutanan dan UPTD Dinas Kehutanan yang terpelihara	391,018,000	390,550,900	99.88	467,100
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	44,000,000	43,465,000	98.78	535,000
		3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	506,444,500	455,949,399	90.03	50,495,101
		4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	61,550,000	55,500,000	90.17	6,050,000
		5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah dinas/ mess yang terpelihara	25,000,000	24,992,000	99.97	8,000
		6 Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi	150,000,000	148,555,000	99.04	1,445,000
		7 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	563,600,000	546,559,050	96.98	17,040,950
		8 Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor	295,000,000	294,624,000	99.87	376,000
	Peningkatan disiplin aparatur	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	370,137,600	367,503,700	99.29	2,633,900
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	81,906,886	76,797,550	93.76	5,109,336
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1 penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Lapoan Tahunan yang tersusun	220,065,700	214,326,700	97.39	5,739,000
		2 Penatausahaan keuangan OPD	Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang	608,380,000	604,868,280	99.42	3,511,720
		3 Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA , DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	273,475,400	257,869,930	94.29	15,605,470
		4 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelolaan aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	264,602,400	260,406,150	98.41	4,196,250
		5 Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan	186,921,600	173,727,000	92.94	13,194,600
	Peningkatan kualitas dan akses	1 Pengembangan data dan informasi kehutanan	Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	246,483,000	223,209,608	90.56	23,273,392
		2 Penyusunan neraca sumber daya hutan	Tersedianya data neraca sumber daya hutan	106,450,000	94,333,998	88.62	12,116,002
		3 Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	122,974,600	108,835,750	88.50	14,138,850
Sasaran Strategis 4				8,057,189,250	7,545,227,029	93.65	511,962,221

Dari Tabel 47 di atas dapat dilihat bahwa serapan anggaran tahun 2019 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, DAK, DBH-DR, dan APBN yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 52.061.114.000,- dan menjadi Rp. 53.168.473.450,- pada anggaran perubahan yang terdiri atas:

- a. Anggaran Sumber Dana Alokasi Khusus: Rp.12.470.540.000,-
- b. Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019: Rp.19.647.589.000,-
- c. Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018: Rp. 700.609.450,-
- d. Anggaran Sumber Dana APBD: Rp. 21.050.344.450,- terdiri dari APBD murni sebesar Rp 18.825.344.450 dan pokok pikiran DPRD sebesar Rp 2.225.000.000,-
- e. Anggaran Sumber Dana APBN: Rp. 612.940.000,-

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja empat sasaran strategis diatas adalah sebesar Rp 41.368.721.458,- atau 77,81% terhadap alokasi dana perubahan. Artinya terdapat sisa anggaran sebesar Rp 11.799.751.992,- atau 22,19%, naik dari sisa anggaran pada tahun lalu yaitu 13,52%. Sisa anggaran sebesar Rp 11.799.751.992,- terdiri dari:

- Tidak dapat dikeluarkannya dari pagu anggaran Dishut terhadap anggaran DAK tahun 2019 senilai Rp 3.411.242.400,- yang tidak disetujui KemenLHK sejak pembahasan tahun 2018.
- Sisa DAK Tahun 2018 senilai Rp 700.609.450,- yang dimasukkan dalam DPPA Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena dibatasi oleh ketentuan pada Permenkeu No. 141 Tahun 2018 (harus mencapai output yang belum tercapai).
- Gagalnya lelang bibit kegiatan DAK yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman (upah penanaman, pengadaan bahan, dan monev) dengan sisa senilai Rp 2.158.970.200,-.
- Gagalnya lelang bibit kegiatan DBH yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman (upah penanaman, pengadaan bahan, dan monev) dengan sisa senilai Rp 2,243,198,500,-.
- Efisiensi sebesar Rp 5.528.929.942,-.

Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target ke empat sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 106,99% dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp. 8.886.794.950,-, realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp. 4.942.671.189,- atau 55,62%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 ini secara keseluruhan 100%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan Dana Alokasi Khusus yang tidak disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat pembahasan di tahun 2018 berada pada program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK) sebesar Rp 3.669.948.896,-. Kegiatan ini tidak disetujui dikarenakan Dinas Kehutanan belum memiliki DED pembangunan gedung kantor resort KPH sebagaimana yang dipersyaratkan oleh tim verifikasi DAK Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp. 31.600.512.250,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 24.527.554.999,- atau 77,62%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Rendahnya realisasi pada Sasaran Strategis 2 diatas disebabkan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi yang pelaksanaan kegiatannya bersifat situasional sehingga tidak terealisasi optimal, yaitu:

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan.
2. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain disebabkan oleh adanya kegiatan yang bersifat situasional, serapan anggaran yang rendah juga disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada Program Rehabilitasi dan dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yaitu:

1. Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan (DBH-DR), kegiatan ini terealisasi 60% disebabkan gagal tender bibit di 7 lokasi pada dua kabupaten, empat lokasi di Kabupaten Agam dan tiga lokasi di Kabupaten Pasaman.
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTnRL, RPRL (DBH-DR), kegiatan ini terealisasi 0% disebabkan tidak adanya penyedia yang menyatakan berminat untuk melaksanakan penyusunan dokumen RTnRL (Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan) tahun 2020.
 3. Pembuatan Tanaman (DAK), kegiatan ini terealisasi 57% disebabkan dari target 410 ha yang berhasil di tanam hanya 235 ha, tidak dilaksanakan penanaman 175 ha disebabkan gagal tender bibit pada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Pemeliharaan tanaman hutan tahun pertama (DAK), kegiatan ini terealisasi 89% disebabkan dari target pemeliharaan tahun pertama seluas 956 ha terealisasi hanya 856 ha, 100 ha tidak dilaksanakan dikarenakan gagal tender bibit di Kabupaten Pasaman.
-
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 3 ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp 4.623.977.000,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 3 adalah sebesar Rp 4.353.268.241,- atau 94,15 % terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp 270.708.759,- merupakan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 4. Meningkatnya tata kelola organisasi
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 4 ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp 8.057.189.250,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis 4 adalah sebesar Rp 7.545.227.029,- atau 93,65% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Sisa anggaran sebesar Rp 511.962.221,- merupakan sisa tender dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Untuk menunjang tercapainya empat sasaran di atas juga didukung oleh belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan pegawai, dan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp 46.361.827.947,- dengan realisasi sebesar Rp 44.840.583.599,- atau sekitar 96,72%. Memperhatikan realisasi serapan anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh sebagaimana yang terdapat pada Tabel 47 di atas maka kinerja keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 86,62% atau turun 3,40% dari realisasi keuangan tahun lalu. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah di atas 95,17% atau turun 4,83% dari realisasi fisik tahun lalu.

Realisasi seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian empat sasaran strategis di atas pada umumnya sudah di atas 85%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dengan dana sebesar Rp 102.692.000,-, terealisasi Rp 88.284.900,- atau 85,97% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 14.407.100,- merupakan efisiensi sisa komponen perjalanan dinas dan belanja makan minum.
2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dengan dana sebesar Rp 110.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp 96.456.150,- atau 87,34% dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 13.983.850,- merupakan efisiensi sisa komponen perjalanan dinas.
3. Pengukuran simpanan karbon dengan dana sebesar Rp 247.050.000,- terealisasi sebesar Rp 221.759.900,- atau 89,76% dengan realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp 25.290.100,- merupakan efisiensi sisa komponen perjalanan dinas.
4. Pengamanan dan Perlindungan Hutan dengan dana Rp 513.620.000,- terealisasi sebesar Rp 397.252.375,- atau 77,34% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 116.367.625,- merupakan efisiensi perjalanan dinas, makan minum, mobilitas darat dan honorarium PPNS.
5. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Mentawai dengan dana sebesar Rp 95.050.000,- terealisasi sebesar Rp 84.988.000,- atau 89,41% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 10.062.000,- merupakan efisiensi komponen perjalanan dinas.
6. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Pasaman Raya dengan dana sebesar Rp 108.100.000,- terealisasi sebesar Rp

- 95.248.080,- atau 88,11% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 12.851.920,- merupakan efisiensi upah buruh dan BBM.
7. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Solok dengan dana sebesar Rp 35.750.000,- terealisasi sebesar Rp 29.710.650,- atau 83,11% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp 6.039.350,- merupakan efisiensi upah buruh, BBM, perjalanan dinas dan belanja sewa sarana mobilitas barang bukti.
 8. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola Limapuluh Kota dengan dana sebesar Rp 72.090.000,- terealisasi Rp 59.790.200,- atau 82,94% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 12.299.800,- merupakan efisiensi BBM dan perjalanan dinas (penginapan).
 9. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya dengan dana sebesar Rp 43.120.000,- terealisasi Rp 35.024.300,- atau 81,23% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 8.095.700,- merupakan efisiensi perjalanan dinas, BBM dan uang transport peserta sosialisasi.
 10. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai dengan dana sebesar Rp 42.450.000,- terealisasi sebesar Rp 31.994.000,- atau 75,37% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 10.456.000,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
 11. Patroli dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Agam Raya dengan dana sebesar Rp 77.870.000,- terealisasi sebesar Rp 63.542.500,- atau 81,60% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 14.327.500,- merupakan efisiensi makan minum, perjadin (penginapan).
 12. Pengadaan kendaraan roda 2 untuk pengamanan KPH dengan dana sebesar Rp 209.292.000,- terealisasi sebesar Rp 186.602.650,- atau 89,16% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 22.689.350,- merupakan sisa tender/lelang.
 13. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya dengandana sebesar Rp 38.400.000,- terealisasi sebesar Rp 26.553.550,- atau 69,15% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 11.846.450,- merupakan sub kegiatan pemadaman yang tidak dilaksanakan.
 14. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Limapuluh Kota dengan dana sebesar Rp 45.020.000,- terealisasi sebesar Rp 31.824.700,- atau 70,69% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran

- sebesar Rp 13.195.300,- merupakan sub kegiatan pemadaman yang tidak dilaksanakan dan efisiensi perjalanan dinas.
15. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya dengan dana sebesar Rp 37.600.000,- terealisasi sebesar Rp 29.302.600,- atau 77,93% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 8.297.400,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
 16. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok dengan dana sebesar Rp 34.880.000,- terealisasi Rp 30.868.800,- atau 88,50% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 4.011.200,- merupakan sisa BBM dan efisiensi perjalanan dinas.
 17. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan dengan dana sebesar Rp 89.245.000,- terealisasi sebesar Rp 56.789.100,- atau 63,63% dengan realisasi fisik sebesar 74,34%. Sisa anggaran sebesar Rp. 32.455.900,- merupakan sub kegiatan pemadaman kebakaran yang tidak dilaksanakan dikarenakan sub kegiatan ini bersifat situasional.
 18. Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai macam metode dengan dana sebesar Rp 636.757.500,- terealisasi sebesar Rp 460.246.584,- atau 72,28% dengan realisasi fisik sebesar 85%. Sisa anggaran sebesar Rp 176.510.916,- disebabkan dari target peserta sosialisasi sebanyak 700 orang, dilaksanakan hanya 600 orang, selain itu sisa anggaran juga disebabkan karena perjalanan dinas apel siaga yang tidak dilaksanakan dikarenakan lokasi yang awalnya direncanakan di luar kota Padang dipindahkan ke kota Padang.
 19. Pelatihan/ pembekalan/ in house training/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp 609.387.000,- terealisasi sebesar Rp 465.514.550,- atau 76,39% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 143.872.450,- merupakan sisa transportasi dan honorarium nara sumber pusat yang tidak hadir, dan efisiensi komponen perjalanan dinas (penginapan).
 20. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp 1.255.160.000,- terealisasi sebesar Rp 1.101.822.500,- atau 87,78% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 153.337.500,- merupakan efisiensi komponen perjalanan dinas.
 21. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp 386.974.000,- terealisasi sebesar Rp 153.243.750,- atau 39,60% dengan realisasi sebesar 67%.

Sisa anggaran sebesar Rp 233.730.250,- disebabkan dari target pemadaman sebanyak 18 kali direalisasikan 12 kali sehingga komponen belanja untuk pemadaman kebakaran hutan sebanyak 6 kali tidak direalisasikan. Hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat situasional sehingga kegiatan ini direalisasikan sesuai jumlah kejadian kebakaran.

22. Monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp 314.690.000,- terealisasi sebesar Rp 152.995.750,- atau 48,625 dengan realisasi fisik sebesar 67%. Sisa anggaran sebesar Rp 161.694.250,- dikarenakan kegiatan ini bersifat situasional, dari target 18 kali direalisasikan 10 kali.
23. Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain dengan dana sebesar Rp 454.649.200,- terealisasi sebesar Rp 305.515.655,- atau 67,20% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Sisa anggaran sebesar Rp 149.133.545,- merupakan efisiensi perjalanan dinas dan terdapat satu kali koordinasi yang tidak dilaksanakan.
24. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan kehutanan Pada KPH Sijunjung dengan dana sebesar Rp 49.660.000,- terealisasi sebesar Rp 44.166.904 atau 88,94% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 5.493.096,- merupakan efisiensi perjalanan dinas, BBM.
25. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan dengan dana sebesar Rp 22.800.000,- terealisasi sebesar Rp 19.270.500,- atau 84,52% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 3.529.500,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
26. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya dengan dana sebesar Rp 18.790.000,-, terealisasi sebesar Rp 13.490.600 atau 71,80% dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 5.299.400,- merupakan efisiensi komponen belanja perjalanan dinas, makan minum dan BBM.
27. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai dengan dana sebesar Rp 25.900.000,- terealisasi sebesar Rp 20.670.000,- atau 79,81% dengan realisasifisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 5.230.000,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
28. Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan dengan dana sebesar Rp 16.340.000,- terealisasi sebesar Rp 13.713.200,- atau 83,92%

- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 2.626.800,- merupakan efisiensi upah buruh, makan minum dan perjalanan dinas.
29. Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove dengan dana sebesar Rp 17.320.000,- terealisasi sebesar Rp 13.563.500,- atau 78,31% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 3.756.500,- merupakan efisiensi perjalanan dinas (penginapan) dan BBM.
 30. Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan dengan dana sebesar Rp 86.820.000,- terealisasi sebesar Rp 76.751.600 atau 88,40% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 10.068.400,- merupakan efisiensi perjalanan dinas, BBM.
 31. Pengembangan usaha perhutanan sosial (DBH-DR) dengan dana sebesar Rp 688.652.200,- terealisasi sebesar Rp 606.328.904,- atau 88,05% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 82.323.296,- merupakan efisiensi perjalanan dinas luar daerah.
 32. Pengendalian perencanaan dan tata hutan dengan dana sebesar Rp 134.371.000,- terealisasi sebesar Rp 115.838.200,- atau 86,21% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 18.532.800,- merupakan efisiensi komponen perjalanan dinas (penginapan, tiket pesawat).
 33. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya dengan dana sebesar Rp 8.280.000, terealisasi sebesar Rp 5.130.250,- atau 61,96% dengan realisasi fisik sebesar 75%. Sisa anggaran sebesar Rp 3.149.750,- merupakan perjalanan dinas untuk pembinaan kepada pemegang izin penggunaan dan pemanfaatan Kawasan hutan tidak dilaksanakan dikarenakan ketidakcermatan dalam menyusun tata waktu pelaksanaan kegiatan.
 34. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota dengan dana sebesar Rp 4.620.000,- terealisasi sebesar Rp 3.321.650,- atau 71,90% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 1.298.350,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
 35. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai dengan dana sebesar Rp 23.900.000,- terealisasi sebesar Rp 18.320.000,- atau 76,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 5.580.000,- merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas (penginapan).
 36. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung dengan dana sebesar Rp 7.010.000,- terealisasi sebesar Rp 5.833.250,- atau

- 83,21% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 1.176.750,- merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas.
37. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok dengan dana sebesar Rp 12.100.000,- terealisasi sebesar Rp 10.659.350,- atau 88,09% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 1.440.650,- merupakan efisiensi BBM dan belanja perjalanan dinas.
38. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung dengan dana sebesar Rp 8.010.000,- terealisasi sebesar Rp 6.355.550,- atau 79,35% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 1.654.450,- merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas.
39. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dengan dana sebesar Rp 13.680.000,- terealisasi sebesar Rp 12.100.750,- atau 88,46% dengan realisasi sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 1.579.250,- merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas.
40. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya dengan dana sebesar Rp 88.000.000,- terealisasi sebesar Rp 67.042.900,- atau 76,19% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 20.957.100,- merupakan efisiensi belanja makan minum, BBM dan perjalanan dinas.
41. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya dengan dana sebesar Rp 41.180.000,- terealisasi sebesar Rp 35.350.200 atau 85,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 5.829.800,- merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas dan BBM.
42. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung dengan dana sebesar Rp 61.594.000,- terealisasi sebesar Rp 49.376.612,- atau 80,16% dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 12.217.388,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
43. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari dengan dana sebesar Rp 57.200.000,- terealisasi sebesar Rp 48.646.000,- atau 85,05% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 8.554.000,- merupakan efisiensi BBM dan belanja perjalanan dinas.
44. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota dengan dana sebesar Rp 47.040.000,- terealisasi sebesar Rp 40.420.500,- atau

- 85,93% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 6.619.500,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
45. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya dengan dana sebesar Rp 64.260.000,- terealisasi sebesar Rp 48.673.495,- atau 75,74% dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 15.586.505,- merupakan efisiensi makan minum, perjalanan dinas dan BBM.
 46. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota dengan dana sebesar Rp 59.280.000,- terealisasi sebesar Rp 48.029.800,- atau 81,02% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 11.250.200,- merupakan efisiensi perjalanan dinas.
 47. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya dengan dana sebesar Rp 50.338.000,- terealisasi sebesar Rp 43.790.100,- atau 86,99% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 6.547.900,- merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas.
 48. Pengembangan Kemitraan Kehutanan dengan dana sebesar Rp 157.089.400,- terealisasi sebesar Rp 140.179.500,- atau 89,24% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 16.909.900,- merupakan efisiensi perjalanan dinas (penginapan) dan BBM.
 49. Pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH-Wisata (DAK) dengan dana sebesar Rp 4.866.642.400,- terealisasi sebesar Rp 1.196.693.504,- atau 24,59% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 3.669.948.896,- merupakan sisa tender dan dana yang tidak ditransfer pusat dikarenakan tidak disetujui pada saat pembahasan DAK.
 50. Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan (DBH-DR) dengan dana sebesar Rp 5.662.223.800,- terealisasi sebesar Rp 3.329.597.700,- atau 58,80% dengan realisasi fisik sebesar 60%. Sisa anggaran sebesar Rp 2.332.626.100,- dikarenakan gagal tender bibit dan belanja komponen yang tidak dapat dibelanjakan akibat dari gagalnya tender bibit tersebut.
 51. Penyusunan Dokumen Perencanaan RTn RL, RPRL (DBH-DR) dengan dana sebesar Rp 222.660.000,- terealisasi 0% dengan realisasi fisik sebesar 0%. Sisa anggaran sebesar Rp 222.660.000,- dikarenakan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penyedia jasa yang berminat untuk menyusun RTnRL 2020.
 52. Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan (DBH-DR) dengan dana sebesar Rp 600.000.000,- terealisasi sebesar Rp 504.657.200,- atau 84,11%

- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 95.342.800,- dikarenakan gagalnya pembelian alat labor (masuk dalam RKBMD perubahan) yang tidak tersedia di dalam negeri..
53. Pembuatan Tanaman (DAK) dengan dana sebesar Rp 4.058.099.450,- terealisasi sebesar Rp 1.899.129.250,- atau 46,80% dengan realisasi fisik sebesar 57,32%. Sisa anggaran sebesar Rp 2.158.970.200,- disebabkan gagal tender bibit di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman sehingga penanaman seluas 175 ha tidak dapat dilaksanakan.
54. Pemeliharaan tanaman hutan tahun pertama (DAK) dengan dana sebesar Rp 1.985.707.600,- terealisasi sebesar Rp 1.761.066.850,- atau 88,69% dengan realisasi fisik sebesar 89,54%. Sisa anggaran sebesar Rp 224.640.750,- disebabkan gagal tender bibit di Kabupaten Pasaman sehingga pemeliharaan tanaman hutan seluas 100 ha tidak dilaksanakan.
55. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik Dana sebesar Rp. 798.160.000 terealisasi sebesar Rp. 523.924.412 (73,93 %) realisasi fisik kegiatan (100%) . Sisa Anggaran Rp. 184.725.588, merupakan efisiensi/sisa mati dari belanja telepon sebesar Rp. 25.899.480, belanja air sebesar Rp 11.860.700, Listrik Rp. 102.353.800, belanja kawat/faksimil/ Internet/VPN Rp. 44.601.608
56. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Dana sebesar Rp. 33.000.000 terealisasi sebesar Rp 24.681.000 (74,79%) realisasi fisik kegiatan (100%), Sisa Anggaran Rp. 8.319.000, merupakan efisiensi/sisa mati dari belanja surat kabar/majalah sebesar Rp. 8.319.000.
57. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Dana sebesar Rp. 507.352.400 terealisasi sebesar Rp 431.661.718 (85,08%) realisasi fisik kegiatan (100%), Sisa Anggaran Rp. 75.690.882, merupakan efisiensi/sisa mati dari belanja BBM Rp. 2.423.150, perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 7.335.000, dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.00.346, dan perjalanan dinas luar Negeri Rp. 54.926.186,-
58. Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi Dananya Rp. 5.000.000 terealisasi sebesar Rp 3.000.000 (60,00%) realisasi fisik kegiatan (100%), Sisa Anggaran Rp. 2.000.000, merupakan efisiensi/sisa mati dari belanja Jasa Publikasi Rp. 2.000.000,-
59. Penyediaan Makanan dan Minuman Dananya Rp. 20.000.000 terealisasi sebesar Rp 16.562.000 (82,81%) realisasi fisik kegiatan (100%), Sisa Anggaran Rp.

3.438.000, merupakan efisiensi/sisa mati dari makan minum rapat Rp. 3.438.000,-

60. Penyusunan neraca sumber daya hutan dengan dana sebesar Rp 106.450.000,- terealisasi sebesar Rp 94.333.998,- atau 88,62% dengan realisasi fisik sebesar 10%. Sisa anggaran sebesar Rp 12.116.002,- merupakan efisiensi komponen belanja perjalanan dinas.
61. Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dengan dana sebesar Rp 122.974.600,- terealisasi sebesar Rp 108.835.750,- atau 88,50% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 14.138.850,- merupakan efisiensi belanja makan minum dan perjalanan dinas.

BAB IV. PENUTUP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maupun Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra dengan menyesuaikan dokumen revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2019.
- Pemutakhiran Sistem Operasional Prosedur (SOP) sesuai hasil evaluasi SOP yang dilakukan oleh auditor internal Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan auditor eksternal.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja setiap 3 bulan sekali.

3. Pelaporan Kinerja

- Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.
- Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program

Anggaran sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.

- Melalui Nota Dinas Kepala Dinas meminta untuk seluruh unit kerja menyusun Laporan Kinerja.

4. Evaluasi Kinerja

- Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, audit internal, tinjauan manajemen, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- Melakukan expose kinerja oleh masing-masing eselon III yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan *reward* dan *punishment* terkait kinerja setiap unit kerja.

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di tahun 2020.

Seluruh rencana capaian kinerja tahun 2019 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 48.

Tabel 48. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

<i>Sasaran</i>	<i>Jumlah IKU</i>	<i>Capaian Sasaran (%)</i>
<i>Sasaran 1</i>	<i>2</i>	<i>100,94</i>
<i>Sasaran 2</i>	<i>1</i>	<i>103,75</i>
<i>Sasaran 3</i>	<i>1</i>	<i>121,20</i>
<i>Sasaran 4</i>	<i>1</i>	<i>102,10</i>
<i>Rata-rata</i>	<i>5</i>	<i>106,99</i>

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya konflik kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan secara operasional masih terkendala dengan peta dasar yang tersedia, masih ada tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan.
2. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kebakaran hutan dan lahan.
3. Hotspot banyak terdapat di luar kawasan hutan namun upaya instansi terkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan masih kurang.
4. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat.
5. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.
6. Tidak dapat dikeluarkannya dari pagu anggaran Dishut terhadap anggaran DAK Tahun 2019 senilai Rp. 3.411.242.400,- yang tidak disetujui KemenLHK sejak pembahasan tahun 2018 menyebabkan serapan anggaran Dinas Kehutanan menjadi rendah.
7. Sisa DAK Tahun 2018 senilai Rp. 700.609.450,- yang dimasukkan dalam DPPA Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena dibatasi oleh ketentuan pada Permenkeu No. 141 Tahun 2018 (harus mencapai output yang belum tercapai).
8. Gagalnya lelang bibit kegiatan DAK yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman (upah penanaman, pengadaan bahan, dan monev) dengan sisa senilai Rp. 2.158.970.200,-.
9. Gagalnya lelang bibit kegiatan DBH yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman (upah penanaman, pengadaan bahan, dan monev) dengan sisa senilai Rp. 2,243,198,500,-.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kab/Kota;
2. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, sosialisasi, dan lain-lain.
3. Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadam kebakaran.
4. Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.
5. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan penggunaan DBH- DR sesuai aturan yang berlaku.
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya Kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan *stakeholders* yang berkepentingan serta dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2019.

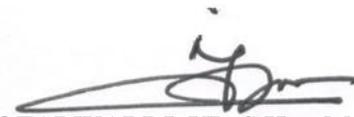
Selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dibidang Kehutanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses

ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2020
Kepala Dinas Kehutanan



YOZARWARDI. UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas sepuluh yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Barat yang secara sistematis tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera” dan Misi 5 Gubernur Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka di tetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2016-2021) sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
2. Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat
3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Ke empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai dengan 173 target kinerja kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN terdiri dari 172 kegiatan sumber dana APBD, 1 kegiatan sumber dana APBN.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah 106,99% yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
1.	Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
		Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	83%	84,55%	101,87	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					100,94	
2.	Daya dukung daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas kerusakan hutan	12%	12,45%	103,75	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					103,75	
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	14,86%	18,01%	121,20	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					121,20	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	A	102,10	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					102,10	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					106,99	

Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Indikator *outcome* yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKU tahun 2019 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis tahun 2019. Pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2019 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan” tahun 2019 sebesar 100,94% diukur melalui capaian 2 (dua) IKU.
2. Capaian sasaran strategis “Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat” tahun 2019 sebesar 103,75% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.

3. Capaian sasaran strategis “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat” tahun 2019 sebesar 121,20% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola organisasi” tahun 2019 sebesar 102,10% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2019 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Aspek Strategis.....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Analisis Perkembangan Strategis	10
1.6.1 Kondisi Saat Ini	10
1.6.2 Kondisi yang Diharapkan	13
1.7 Peningkatan Sistem Akip dan Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	14
1.8 Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	17
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	17
2.2 Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ..	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	31
2.4 Rencana Kinerja Sasaran.....	32
2.5 Rencana Kinerja Kegiatan.....	34
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2019	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	37
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	45
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	47
BAB IV PENUTUP	137
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	iv
Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.....	5
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021	20
Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	32
Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	32
Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2019	34
Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2019.....	42
Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2018 dan 2019	43
Tabel. 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	44
Tabel. 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	46
Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2019	48
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 dan Tahun 2019	49
Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016- 2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021	51
Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara.....	52
Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2019	55
Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Fungsi Dan Peruntukannya per Triwulan Tahun 2019	61
Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat	62
Tabel 20. Capaian Target IKU Nilai PNBPN Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2019....	69
Tabel 21. Target dan Realisasi PNBPN Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2019.....	70

Tabel 22.	Pencapaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Tahun 2019	73
Tabel 23.	Perbandingan Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	74
Tabel 24.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	75
Tabel 25.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana).....	76
Tabel 26.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara.....	77
Tabel 27.	Realisasi Capaian Target Indikator kinerja Kegiatan Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung hutan Meningkatkan Tahun 2019.....	81
Tabel 28.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2019.....	85
Tabel 29.	Tutupan Lahan Kawasan Hutan (ha) Tahun 2017 hingga Tahun 2019.....	86
Tabel 30.	hasil Evaluasi Tanaman Tahun N-5	87
Tabel 31.	Jumlah Kelompok Lembaga Masyarakat Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis nagari hingga Tahun 2019 di Sumatera Barat	88
Tabel 32.	Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2019	91
Tabel 33.	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	92
Tabel 34.	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	92
Tabel 35.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat Tahun dengan Capaian Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ..	94
Tabel 36.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat Tahun dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara.....	94
Tabel 37.	Realisasi capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3 Tahun 2019	97
Tabel 38.	Capaian target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat Per Triwulan Tahun 2019	100
Tabel 39.	Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial	101
Tabel 40.	Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2019....	107
Tabel 41.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	107

Tabel 42.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	109
Tabel 43.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Sumatera Utara.....	109
Tabel 44.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 4 Tahun 2019.	111
Tabel 45.	Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2018	114
Tabel 46.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir	115
Tabel 47.	Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	116
Tabel 48.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	145

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	9
Gambar 2. Tujuan Sasaran Strategis I.....	48
Gambar 3. Capaian Target Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	49
Gambar 4. Capaian kinerja Pencapaian Target Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (%) Tahun 2016 - 2019	50
Gambar 5. Realisasi Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 - 2019	50
Gambar 6. Capaian Kinerja Nilai PNBPN Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 - 2019.....	50
Gambar 7. Tujuan, Sasaran Strategis 2, dan Indikator Kinerja Utama 3	72
Gambar 8. Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan (%) Tahun 2017 - 2019	74
Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan laju Kerusakan Hutan Tahun 2017 – 2019.....	75
Gambar 10. Perbandingan skenario target penurunan laju kerusakan hutan dengan laju kerusakan hutan yang terjadi (ha/tahun)	86
Gambar 11. Skenario dan Realisasi <i>Hot Spot</i> Tahun 2015-2019	90
Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis 3	91
Gambar 13. Realisasi Kinerja Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat (%) Tahun 2016-2019	92
Gambar 14. Capaian Kinerja Peran serta masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat (5) Tahun 2016-2019	93
Gambar 15. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Delapan Tahun Terakhir	101
Gambar 16. Penyerahan Penghargaan /Apresiasi Tokoh Hutsos Tahun 2019.....	105
Gambar 17. Tujuan dan Sasaran Strategis 4	106
Gambar 18. Realisasi Kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s/d Tahun 2018	106
Gambar 19. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018	108

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja SKPD

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV

Lampiran 3. Certificate ISO 9001:2015

Lampiran 4. Penghargaan Tahun 2019

